PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

SKRIPSI

Oleh:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 30 November 2017
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing

Moh. Djazari, M. Pd.
NIP. 19551215 197903 1 003

PENGESAHAAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Oleh:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Desember 2017
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, M. Si., Ak., CA	Ketua Penguji		27-12-2017
Drs. Moh. Djazari, M. Pd.	Sekretaris		28-12-2017
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.	Penguji Utama		22-12-2017

Yogyakarta, 29 Desember 2017
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,

Dr. Sugiharsono, M. Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lailatul Mubasiroh
NIM	: 16812147030
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Penulis,

Lailatul Mubasiroh

NIM. 16812147030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”. (Q.S. Al-Baqarah: 45)
2. “Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q. S. Al-Imran: 139)

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur, Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah mendidik saya sampai sekarang ini.
2. Segenap pihak yang telah memberikan dukungan spiritual, arahan dan masukan.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

Oleh:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan berasal dari laporan Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) = 0,739, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) = 0,546 dan t hitung 6,302 > t tabel 2,040 . 2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) = 0,806, koefisien determinasi (r^2_{x2y}) = 0,650 dan t hitung 7,824 > t tabel 2,040. 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) = 0,427, koefisien determinasi (r^2_{x3y}) = 0,182 dan t hitung 2,720 > t tabel 2,040. 4) Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) = 0,882, koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) = 0,779 dan nilai F hitung 36,368 > F tabel 2,92.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

THE EFFECT OF ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUES (PAD), GENERAL ALLOCATION FUNDS (DAU) AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS (DAK) TO THE CAPITAL EXPENDITURES IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA PROVINCE YEAR 2010-2016

By:
LAILATUL MUBASIROH
16812147030

ABSTRACT

The aims of this research are to know: 1) The effect of Original Local Goverment Revenues to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 2) The effect of General Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 3) The effect of Special Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province. 4) The effect of Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds and Special Allocation Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province.

The population in this research is regency and municipality in Special Region of Yogyakarta Province. Data used comes from APBD Realization Report years 2010-2016. The technique of collecting data used documentation method. The test of prerequisite analysis used classical assumption test, those are normality, multicolinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The hypothesis test in this research used simple and multiple linear regression analysis.

The result of this research showed that: 1) There is positive and significant effect of Original Local Goverment Revenue to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x1y}) = 0,739, determination coefficient($r^2{}_{x1y}$) = 0,546 and t arithmetic 6,302 > t table 2,040. 2) There is positive and significant effect of General Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x2y}) = 0,806, determination coefficient ($r^2{}_{x2y}$) = 0,650 and t arithmetic 7,824 > t table 2,040. 3) There is positive and significant effect of Special Allocation Funds to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x3y}) = 0,427, determination coefficient = ($r^2{}_{x3y}$) 0,182 and t arithmetic 2,720 > t table 2,040. 4) There is positive and significant effect of Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Special Region of Yogyakarta Province, this is indicated by the correlation coefficient ($R_{y(1,2,3)}$) = 0,882, determination coefficient ($R^2{}_{y(1,2,3)}$) = 0,779 and F aritmetic 36,368 > F table 2,92.

***Keywords**: Original Local Goverment Revenues, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditures.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SwT. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016" dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi UNY .
3. Bapak Moh. Djazari, M.Pd., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan Tugas Akhis Skripsi.
4. Bapak Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak., Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
5. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini berrmanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Penulis,

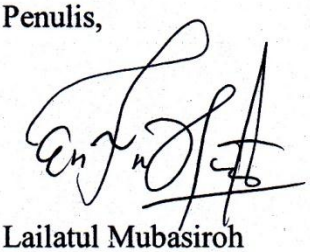

Lailatul Mubasiroh

NIM. 16812147030

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i
PERSETUJUAN ii
PENGESAHAAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Pembatasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 11
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA 14
A. Kajian Teori 14
1. Belanja Modal 14
a. Pengertian Belanja Modal 14
b. Macam-macam Belanja Modal 16
c. Peranan Belanja Modal 19
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal 20
2. Pendapatan Asli Daerah 22
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 22

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 23
3. Dana Alokasi Umum 29
a. Pengertian Dana Alokasi Umum 29
b. Perhitungan Dana Alokasi Umum 30
4. Dana Alokasi Khusus 33
a. Pengertian Dana Alokasi Khusus 33
b. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus 36
B. Penelitian yang Relevan 40
1. Penelitian Kesit Bambang Prakosa (2004) 40
1. Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) 41
2. Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014) 43
C. Kerangka Berfikir 44
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 44
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 45
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 47
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal 48
D. Paradigma Penelitian 49
E. Hipotesis Penelitian 50
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis atau Desain Penelitian 51
B. Tempat dan Waktu Penelitian 51
C. Populasi 51
D. Definisi Operasional Variabel 52
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Teknik Analisis Data 54
1. Uji Asumsi Klasik 55
a. Uji Multikolonieritas (*Multikolinearity*) 55
b. Uji Heteroskedastisitas 56
c. Uji Autokorelasi 58
2. Uji Hipotesis 58

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 58
b. Analisis Regresi Linear Berganda 61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Hasil Penelitian 66
1. Data Umum 66
a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi DIY 66
b. Objek Penelitian 67
2. Data Khusus 68
3. Analisis Data 76
a. Uji Asumsi Klasik 76
1) Uji Multikolinearitas 76
2) Uji Heteroskedastisitas 78
3) Uji Autokorelasi 82
b. Uji Hipotesis 83
1) Analisis Regresi Linier Sederhana 83
a) Uji Hipotesis Pertama 83
b) Uji Hipotesis Kedua 86
c) Uji Hipotesis Ketiga 90
2) Analisis Regresi Linear Berganda 93
B. Pembahasan 98
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal 98
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 100
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal 102
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Umum Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal ... 104
C. Keterbatasan Penelitian 106
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 108
A. Simpulan 108
B. Implikasi 109

C. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 111
LAMPIRAN 114

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013..... 4
2. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013..... 5
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 69
4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 69
5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 69
6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 69
7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 70
8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 70
9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (Dalam Ribuan Rupiah)..... 70
10. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)..... 71
11. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016..... 72

12. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tertinggi ke Terendah Tahun 2010-2016..... 73
13. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016..... 74
14. Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016..... 75
15. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi..... 76
16. Hasil Uji Mulitikolinearitas dengan VIF dan *Tolerance*..... 77
17. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Rank Spearman*..... 80
18. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Park*..... 81
19. Hasil Uji Autokorelasi Metode *Run Test*..... 82
20. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y)..... 83
21. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) 87
22. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) 90
23. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi khusus (X_3) Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan..... 33
2. Paradigma Penelitian..... 49
5. Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Data Realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal Di Provinsi DIY Tahun 2010-2016..... 114
2. Hasil Perhitungan IBM SPSS *Statistics Version* 20..... 115
3. Surat Ijin Penelitian dan Surat Keterangan dari Badan Pusat Statistik Provinsi DIY tentang Legalitas Data..... 126
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah (Kabupaten Dan Kota) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016..... 129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok Belanja Langsung pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal. Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Mardiasmo (2004: 187) menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Belanja Modal merupakan komponen Belanja Langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap yang dalam pemanfaatan aset tetap tersebut ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan ada yang tidak dimanfaatkan langsung oleh publik. Pemanfaatan aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik diantaranya adalah jalan raya, jembatan, trotoar, rambu lalu lintas, dan stadion atau gedung olahraga. Pemanfaatan aset yang tidak berhubungan

langsung dengan pelayanan publik atau tidak dimanfaatkan langsung oleh publik yaitu seperti gedung kantor pemerintahan.

Sejalan dengan pembaharuan peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan diamandemennya UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004, kemudian diikuti dengan amandemen PP No. 105 Tahun 2000 menjadi PP no. 58 Tahun 2005, dan amandemen Kepmendagri No. 29 Tahun 2005 menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengalokasian sumber daya ke dalam Belanja Modal (*Capital Expenditures*) sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pada prinsipnya, Belanja Modal dialokasikan untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat daerah yang bersangkutan. Alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas pemerintah daerah atau fasilitas publik. Ulum (2008: 251) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah lebih meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal.

Sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaannya sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal untuk kelancaran tugas pemerintah daerah ataupun untuk kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa Belanja Modal dipengaruhi berbagai faktor diantaranya adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum, 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), dan 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah sebagai modal utama untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah dan merupakan cermin kemandirian bagi suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro, 2014: 7). Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap daerah mempunyai dasar tersendiri untuk pengenaan pajak dan retribusi daerah

tergantung dengan kebijakan dan peraturan daerah setempat. Besarnya persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan Pendpatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 mencapai 38,87% dari total pendapatan daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.

Pemerintah Daerah	**Realisasi PAD (Jutaan Rupiah)**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**Persentase PAD terhadap Belanja Daerah.**
D.I. Yogyakarta	1.004.063,12	38,87	40,01
Kab. Kulonprogo	95.991,51	9,57	9,95
Kab. Bantul	224.197,86	14,75	16,16
Kab. Gunung Kidul	83.427,45	6,72	7,07
Kab. Sleman	449.270,30	23,65	26,53
Kota Yogyakarta	383.052,14	29,25	31,07

Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014: 10.

Dari tabel di atas terlihat bahwa besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan Pendapatan Asli Daerahnya di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Bantul sebesar 14,75 persen, Kabupaten Sleman Sebesar 23,65 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 29,25 persen. Besarnya sumbangan PAD untuk Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul masih di bawah 10 persen. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan

berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk Belanja Modal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat.

Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) menurut Kuncoro (2014: 58), adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum menurut Halim (2008: 160) merupakan Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013.

Pemerintah Daerah	**Realisasi DAU (Jutaan Rupiah)**	**Persentase DAU terhadap Pendapatan Daerah**	**Persentase DAU terhadap Belanja Daerah**
D.I. Yogyakarta	757.056,70	29,31	30,17
Kab. Kulonprogo	594.978,79	59,31	61,68
Kab. Bantul	854.810,63	56,23	61,60
Kab. Gunung Kidul	779.069,24	62,72	66,01
Kab. Sleman	891.589,91	46,94	52,65
Kota Yogyakarta	597.212,21	45,60	48,44

Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014: 14.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 29,31 persen. Dari kelima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong masih tinggi dikarenakan masih ada tiga kabupaten yang tingkat penerimaan Dana Alokasi Umum-nya di atas 50 persen, yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 59,31 persen, Kabupaten Bantul sebesar 56,23 persen, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar 62,72 persen. Semakin besar penerimaan Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber pendapatan daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dengan semakin besarnya persentase Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.

Dana perimbangan lain selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasaranan dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasaranan dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana

fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro, 2014: 70). Dana bagi hasil merupakan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah (UU/33/2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pengeluaran kepentingan daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan Belanja Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah (Afifah, 2010: 15). Belanja Daerah sendiri terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah persentase dana yang digunakan untuk Belanja Operasi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung konsumtif dan tingkat produktifitas pemerintah daerah rendah. Di lain pihak masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan presentase Belanja Modal yang semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 4) Dana Bagi Hasil. Dana Bagi hasil

sebagai salah satu bagian dari Dana Perimbangan tidak termasuk dalam variabel dalam penelitian ini karena pengaruhnya yang tidak signifikan

Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefullnes*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah masing-masing daerah. Pemanfaatan dan pengalokasian Belanja Modal juga diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi daerah baik dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan kualitas publik lainnya. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan Belanja Modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan. Darmawanto dan Yustikasari (2007) menjelaskan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik. Kedua pernyataan tersebut menyiratkan bahwa pemanfaaatan Belanja Modal untuk berbagai kepentingan publik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar persentase Belanja Modal terus ditingkatkan mulai dari 24%, kemudian 26-27% hingga pada tahun 2014 menjadi 30% (Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2013).

Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal, namun realitasnya persentase Belanja Modal dalam pelaksanaannya memiliki kecenderungan yang semakin menurun jika dibandingkan dengan total belanja daerah (Halim, 2014: 226). Seharusnya pemerintah daerah lebih memprioritaskan urusan wajib dalam hal pengalokasian belanja daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk digunakan dalam hal pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah ke dalam Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016)"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Belanja Modal seharusnya lebih diutamakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat/publik, sehingga persentase Belanja Modal seharusnya lebih besar dari pada Belanja Operasi.
2. Belanja Modal dipengaruhi oleh sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), 4) Dana Bagi Hasil (DBH), 5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kurang maksimal dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal.
4. Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak sesuai dengan tujuan yang semestinya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terfokuskan. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Periode yang diambil untuk penelitian ini adalah periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.
3. Variabel-variabel yang mempengaruhi Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadapa Belanja Modal di Provinsi Daerah Isstimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.

4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Balanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

   Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bahan dalam mempelajari pengalokasian sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu pendapatan daerah secara produktif oleh pemerintah daerah. Selain itu juga untuk memperdalam mengenai materi organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

      Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase alokasi Belanja Modal.

   b. Bagi Peneliti

      Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih lanjut mengenai ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah

mengenai hal-hal yang terkait dengan sektor publik, yaitu pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pada umumnya dan akuntansi keuangan daerah pada khususnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian Belanja Modal menurut Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008: 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sementara menurut Mardiasmo (2004: 187), Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Belanja Modal

adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa manfaaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset.

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga menambah aset pemerintah.
2) Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3) Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Hoesada (2016: 238) menjelaskan bahwa Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan ataupun rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar persentase alokasi Belanja Modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alokasi Belanja Modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga jumlah alokasi Belanja Modal setiap tahunnya seharusnya relatif besar. Semakin besar alokasi Belanja Modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu pula sebaliknya.

b. Macam-macam Belanja Modal

Halim (2008: 101) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam Belanja Modal adalah: 1) Belanja Modal Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

   Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaiaan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk

perancanaan, pengawasan dan pengelolaan pembanguan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangungan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

   Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

   Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

c. Peranan Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengaloksikan dana dalam bentuk Belanja Modal dalam APBD dalam rangka untuk menambah aset tetap yang dimilik oleh daerah. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan

dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229). Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran. Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya.

Menurut Bambang Prakosa (2004), pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Secara konseptual pendapatan atau pemasukan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran. Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dapat mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah. Abdullah dan Halim (2004) dalam penelitannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal

pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan pendapatan asli dari daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Halim (2008: 96) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sementara menurut Darise (2008: 135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang menjadi pendapatan yang diterima daerah yang berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dari penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai peranan penting bagi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan tiang utama yang menjadi penyangga kehidupan daerah. Tanpa adanya dana yang mencukupi untuk membiayai kebutuhan daerah, maka ciri pokok dari pelaksanaan otonomi daerah akan menghilang.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2008: 96), yaitu:

1) Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2008: 135). Secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak. Aturan pelaksanaan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan mengenai jenis objek pajak untuk provinsi dan objek pajak kabupaten/kota.

Jenis objek pajak untuk propinsi adalah sebagai berikut:

a) Pajak kendaraan bermotor.
b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d) Pajak kendaraan di atas air.
e) Pajak air di bawah tanah.
f) Pajak air permukaan.

Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Pajak hotel.
b) Pajak restoran.
c) Pajak hiburan.
d) Pajak reklame.
e) Pajak penerangan jalan.
f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
g) Pajak parkir.

2) Retribusi Daerah.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentan Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Dalam Akuntansi Keuangan Daerah (Darise, 2008: 136) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Jenis pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah dibedakan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Jenis retribusi daerah untuk provinsi adalah: a) retribusi pelayanan kesehatan; b) retribusi pemakaian kekayaan daerah; c) retribusi penggantian biaya cetak peta; d) retribusi pengujian kapal perikanan. Sementara retribusi daerah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Retribusi pelayanan kesehatan.
b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c) Retribusi penggantain biaya cetak KTP.
d) Retribusi penggantian penggantian biaya cetak akta catatan sipil.

e) Retribusi pelayanan pemakaman.

f) Retribusi pelayanan pengabuan mayat.

g) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

h) Retribusi pelayanan pasar.

i) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

k) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

l) Retribusi pengujian kapal perikanan.

m) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.

n) Retribusi jasa usaha pasar, grosir atau pertokoan.

o) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan.

p) Retribusi jasa usaha terminal.

q) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir.

r) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

s) Retribusi jasa usaha penyedotan kakus.

t) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan.

u) Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal.

v) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga.

w) Retribusi jasa usaha penyebrangan di atas air.

x) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair.

y) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

z) Retribusi izin mendirikan bangunan.

aa) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

bb) Retribusi izin gangguan.

cc) Retribusi trayek.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2008: 98). Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara mandiri oleh daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan menurut Darise (2008: 136) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dari keteranan tersebut, maka perusahan daerah merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagi daerah yang mempunyai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air minum (PDAM),

Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, Pasar dan lain sebagainya merupakan bagian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

   Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain milik pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menerangkan yang termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diklasifikasikan sebagai berikut:

   a) Hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan.
   b) Jasa giro.
   c) Pendapatan bunga.
   d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
   e) Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengaloksian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Kuncoro (2014: 63), Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut, maka yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan setiap daerah yang

didistribusikan dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga tercapai pemerataan kemampuan keuangan antara setiap daerah.

Menurut Mardiasmo (2004: 144), Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Dana Alokasi Umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Prinsip alokasi Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika potensi daerah kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar.

b. Perhitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan dan pengalokasian Dana Alokasi Umum diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005, dijelaskan bahwa:

a) Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
b) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.
c) Proporsi Dana Alokasi Umum antara propinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota.

Mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Umum menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas tiga tahapan berikut:

a) Tahapan Aakademis

   Tahapan akademis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b) Tahapan Administratif

   Dalam tahapan administratif, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi umum. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang digunakan.

c) Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan capasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

Berikut ini merupakan gambar skema perhitungan Dana Alokasi Umum yang menunjukkan komponen-komponen apa saja yang menyusun Alokasi Dana Alokasi Umum:

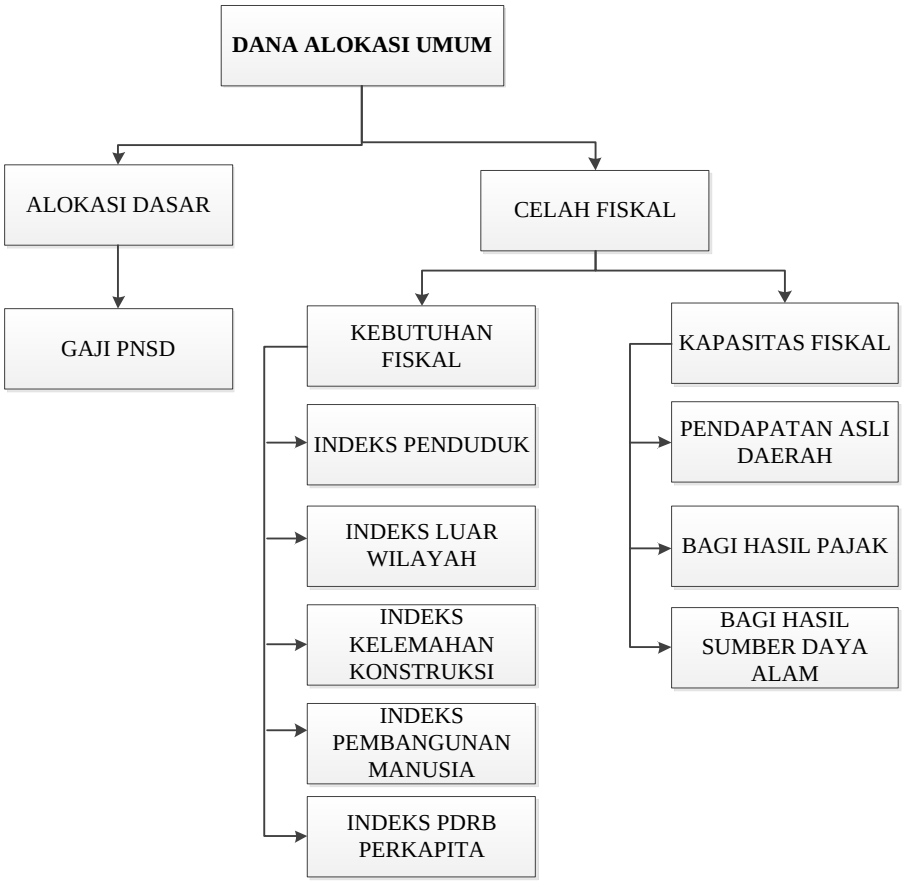

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Gambar 1. Skema Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

4. Dana Alokasi Khusus

a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Belanja Modal juga dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain Dana Alokasi Umum. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Umum adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menerangkan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Mardiasmo (2004: 144) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu pembiayaan kebutuhan tertentu, yaitu merupakan program nasional atau program kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dari beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana daerah (fasilitas fisik).

Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegaitan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daearah (Nurlan Darise, 2014: 137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.

b. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145/PMK.07/2013, dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus harus memenuhi kriteria umum, khusus dan juga teknik. Sementara dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

1) Penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi khusus.
2) Penentuan besaran alokasi Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing daerah.

Penentuan daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus didasarkan pada hal-hal:

1) Daerah yang mempunyai Indeks Fiskal Neto (IFN) dibawah rata-rata IFN nasional.
2) Daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus.
3) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah (IFW) berada di atas rata-rata IFW nasional.
4) Daerah dengan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) berada diatas rata-rata IFWT nasional.

Penetapan besarnya Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah ditentukan berdasarkan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk masing-masing daerah dibagi dengan bobot Dana Alokasi Khusus per bidang untuk seluruh daerah dikalikan dengan pagu Dana Alokasi Khusus per bidang. Bobot Dana Alokasi Khusus per bidang

ditetapkan berdasarkan Indeks Fiskal Wilayah Teknis (IFWT) dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah:

1) Bidang pendidikan, Dana Alokasi khusus dialokasikan untuk mendukun program penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu dan merata.
2) Bidang kesehatan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningakatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta penegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
3) Bidang infrastruktur jalan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatakan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten dan kota serta menunjang aksebilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan.
4) Bidang infrastruktur irigasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawayang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mendukung pemenuhan

sasaran prioritas nasional di bidang ketahanan pangan menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014.

5) Bidang infrastruktur air minum, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs).
6) Bidang infrastruktur sanitasi, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal/terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
7) Bidang prasarana pemerintahan desa, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diprioritaskan kepada daerah pemekaran dan daerah tertinggal.
8) Bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
9) Bidang kelautan dan perikanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu,

pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukkung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

10) Bidang pertanian, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mengembangkan sarana dan prasarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.
11) Bidang keluarga berencana, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program dan kegiatan.
12) Bidang kehutanan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.
13) Bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembanguan daerah tertinggal.
14) Bidang sarana pedagangan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di daerah

tertinggal, perbatasan, daerah pemekaran, dan daerah yang minim sarana perdagangan.

15) Bidang energi pedesaan, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbaru setempat untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.
16) Bidang perumahan dan pemukiman, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan penyediaan sarana, prasarana, utilitas perumahan dan kawasan pemukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan pemukiman.
17) Bidang keselamatan transportasi darat, Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi penggunan transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Kesit Bambang Prakosa (2004)

Penelitian Kesit Bambang Prakosa tahun 2004 berjudul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya Belanja Daerah di pengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Secara simultan Dana Alokasi Umum dan

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam prediksi Belanja Daerah, daya prediksi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih tinggi dibandingkan daya prediksi Pendapatan Asli Daerah.

Perbedaan dari penelitian Kesit Bambang Prakosa dengan penelitian penulis adalah dalam hal penggunaan variabel terikat (dependen) dan obyek penelitian yang digunakan. Penelitian Kesit Bambang Prakoso menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel independen (yang dipengaruhi), sementara penulis menggunakan Belanja Modal sebagai variabel independen. Obyek penelitian pada penelitian Kesit Bambang Prakoso adalah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sementara obyek penelitian penulis adalah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kedua perbedaan tersebut, terdapat satu perbedaan yaitu penulis menggunakan tambahan satu variabel bebas (independen) yaitu Dana Alokasi Khusus yang tidak digunakan dalam penelitian Kesit Bambang Prakoso.

Persamaan antara penelitian Kesit Bambang Prakoso dengan penelitian penulis adalah dalam penggunaan variabel bebas (independen). Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

1. Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013)

Penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 2013 berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011). Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal; Dana Alokasi Umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal; Pertumbuahan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto dengan dengan peneliltain penulis terletak pada variabel bebas yang digunakan dan obyek serta periode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel bebas (independen) Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum. Penulis tidak mengunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi namun menggunakan variabel Dana Alokasi Umum yang tidak digunakan dalam penelitian Fiona Puspita Devi. Obyek penelitian Fiona Puspita Devi adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian 2008-2011, sementara obyek penelitian penulis adalah Kabupaten dan Kota di Pprovinsi Daerah Istimewa Yogykarta dengan periode penelitian 2010-2016.

Persamaan antara penelitian Fiona Puspita Devi dengan penelitian penulis adalah pada variabel terikat (independen) yang digunakan.

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian Fiona dan Penulis adalah Belanja Modal.

2. Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014)

Penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung) pada tahun 2014 berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif namum tidak signifikan dikarenakan peningkatan Dana Alokasi Umum relatif kecil.

Perbedaan penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan variabel terkait dalam penelitian, obyek penelitian dan periode penelitian. Dalam penelitain Anjar Guritno dan Leny Suzan menggunakan dua variabel independen (bebas) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sementara penulis menggunakan tiga variabel independen (bebas) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Obyek penelitian yang dilakukan oleh Anjar Guritno dan Leny Suzan adalah pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya

dengan periode penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2013. Obyek penelitian penulis adalah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perode penelitian mulai tahun 2010 sampai dengan 2016.

Persamaan penelitian Anjar Guritno dengan penelitian penulis terletak pada variabel terikat (dependen) yang digunakan. Variabel terikat (dependen) yang digunakan adalah Belanja Modal.

C. Kerangka Berfikir

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap atau aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahaan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal pada anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemetintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin meningkatnya persentase Belanja Modal maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat

tersebut. Dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal, setiap daerah harus mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan potensi dari masing-masing daerah. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya akan memberikan penerimaan bagi daerah yanag disebut Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penghasilan asli dari daerah yang harus selalu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan pemeritah daerah sehingga dapat tercipta kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal meskipun persentase Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar sepuluh persen dari total pendapatan daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dalam Buletin Teknis No. 04 SAP dijelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Suatu belanja dikategorikan sebagai Belanja modal apabila pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya penambahan aset pemerintah, pengeluaran

tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset dan perolehan aset tetap tersebut bukan untuk dijual. Belanja modal pada prinsipnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana daerah dan lebih difokuskan untuk kegiatan produktif yaitu untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk meningkatkan produktivitas pemerintah dalam rangka pengadaan fasilitas publik, maka pengalokasian Belanja Modal harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi alokasi Belanja Modal selain Pendapatan Asli daerah adalah Dana Alokasi Umum yang merupakan salah Satu Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan fiskal (*fiscal gap*) dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan sumber dana yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam alokasi Belanja Modal, hanya saja dana tersebut diterima dari Pemerintah Pusat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sehingga pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Belanja Modal yang merupakan komponen belanja langsung yang dalam pelaksanaannya lebih ditekankan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasaran untuk kelancara tugas pemrintah dan juga fasilitas umum selain dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum juga dipengaruhi oleh Dana Aloksi Khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana tranfer dari pemerintah yang juga merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk tujuan khusus seperti untuk sarana dan prasarana daerah miskin dan tertinggal, kawasan perbatasan, pengolahan limbah dan lain-lain. Persentase pengalokasian Dana Alokasi Khusus bergantung pada apakah daerah tersebut layak untuk menerima Dana Alokasi Khusus dan Indeks Fiskal Wilayah daerah tersebut. Sama dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana yang di alokasikan untuk Belanja Modal sehingga dapat menigkatkan pelayanan publik.

Dari keterangan mengenai Dana Alokasi Khusus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima suatu daerah, maka alokasi Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakuakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegaitan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal seharusnya didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana yang ditujukan baik untuk kelancara tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk menigkatkan pelayanan publik sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004, maka setiap daerah harus mampu untuk merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerahnya masing-masing disebut kemudian Pendapatan Asli Daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah, yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditujukan untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk menigkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Sementara Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang ditujukan untuk tujuan khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi alokasi Belanja Modal oleh pemerintah daerah.

D. Paradigma Penelitian

Hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khsusus terhadap Belanja Modal dapat digambarkan sebagai berikut:

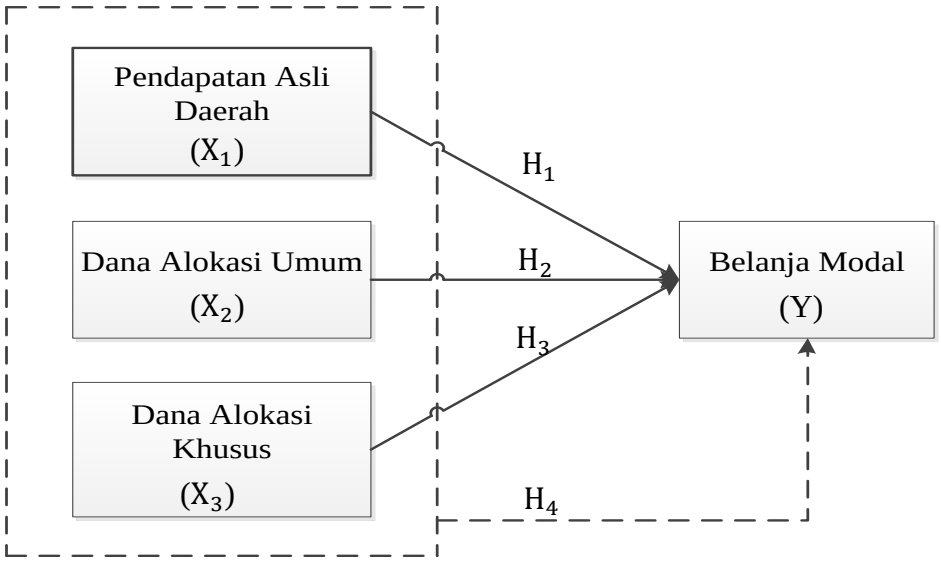

Gambar 2. Paradigma Penelitian.

Keterangan:

X_1 = Variabel Independen 1, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

X_2 = Variabel Independen 2, Dana Alokasi Umum (DAU).

X_3 = Variabel Independen 3, Dana alokasi Khusus (DAK).

Y = Variabel Dependen, Belanja Modal.

⟶ = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen.

- - - - -> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen secara bersama-sama.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis atau Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak mengunakan angka-angka dan analisis yang dilakukan menggunakan statistik. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang melalui data untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti (Alhamda, 2016: 5).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilakukan antara bulan Oktober 2017.

C. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2015: 80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang

terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, yaitu: 1) Kabupaten Sleman, 2) Kabupaten Bantul, 3) Kabupaten Kulonprogo, 4) Kabupaten Gunung Kidul dan 5) Kota Yogyakarta.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal tidak hanya merupakan pengeluaran anggaran untuk pembelian aset atau inventaris, tetapi juga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah dan mempertahankan masa manfaat aset, serta menambah kapasitas dan kualitas aset. Indikator untuk pengukuran Belanja Modal adalah:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

(Fiona Devi Purwanto, 2013: 37)

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dihasilkan dan berasal potensi daerahnya masing-masing yang dapat digali dan digunakan secara mandiri oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah.

PD = Pajak Daerah.

RD = Retribusi Daerah.

HPKDYD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPADYS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(Fiona Devi Purwanto, 2013: 38)

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) adalah sebagai berikut:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mengolah dan mencatat data yang berhubungan dengan penelitain ini. Data yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sampai dengan 2016.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis berupa analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, agar persamaan regresi terebut layak digunakan atau diaplikasikan maka harus memenuhi uji asumsi klasik yaitu uji normalitas (*normality*), uji multikolinearitas (*multikolinearity*), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Supriyadi, 2014: 71). Uji Normalitas tidak digunakan dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan populasi (tidak menggunakan sampel).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolonieritas (*Multikolinearity*)

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Menurut Nugroho (2005: 58), jika nilai koefisien korelasi antara masing-masing variabel independen (bebas) kurang dari 0,7 maka persamaan (model) dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Jika koefisien korelasi lebih dari 0,7 maka diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen (bebas) sehingga terjadi multikolinearitas. Supriyadi (2014: 83) menjelaskan pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji VIF-TOL (*Variance Inflation Factor-Tolerance*), uji klein dan CI (*Condition Index*).

1) Pengujian dengan menggunakan VIF-TOL, jika nilai VIF tidak lebih kecil dari 10 (< 10) dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. VIF = 1/*Tolerance*, jika VIF = 10 maka *Tolerance* = 1/10 =0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *Tolerance*.
2) Uji klein dilakukan dengan membandingkan antara R_i^2 atau nilai 1-TOL (*tolerance*) dengan R^2. Jika lebih kecil maka tidak terdapat multikolinearitas.
3) CI (*Condition Index*), jika nilai CI < 30 maka tidak terdapat multikolinearitas.

Sementara menurut Sunyoto (2011: 79), kriteria dari uji multikolinearitas adalah:

1) Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapatan lain: lebih besar dari 0,50 dan 0,90).
2) Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,60 (≤ 60).

Menurut Supriyadi (2014: 59), uji multikolinearitas merupakan bentuk pengujian bahwa seluruh variabel independen harus terbebas dari gejala *multikolinearity* atau dengan kata lain antara variabel independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam analisis regresi variabel independen (bebas) yang digunakan seharusnya tidak mempunyai multikolinearitas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar variabel independennya sama dengan nol.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas (supriyadi, 2014: 60) merupakan asumsi dimana dalam regresi berganda varians dari residual (data) tidak konstan atau berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai variabel independen. Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain atau gambaran

hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* (Nugroho, 2005: 62). Analisis regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas dapat menggunakan metode grafik, uji korelasi *rank spearman* atau *Uji Park*.

1) Metode Grafik

   Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel estimasi variabel dependen biasa Y *estimate* (sebagai sumbu datar) dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola pada grafik berbentuk random atau acak, maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

2) Uji Korelasi *Rank Spearman*

   Dalam uji korelasi *rank spearman* jika nilai p > 0,05 maka variabel independen tidak menyebabkan masalah heteroskesdastisitas. Jika nilai p < 0,05 variabel independen menyebabkan terjadi masalah heteroskedastisitas.

3) Uji *Park*

   Dalam uji *park* jika nilai p > 0,05 maka variabel independen tidak menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai p < 0,05 maka variabel independen menyebabkan masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Supriyadi (2014: 60) uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik dan tidak layak pakai prediksi.

Salah satu cara untuk pengujian autokorelasi dilakukkan dengan menggunakan uji *Run Test*. *Run Tes* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Menurut Ghozali (2012: 120) jika nilai *asymp.sig* (2-*tailed*) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai *asymp.sig* (2-*tailed*) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum dari analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:
Y = Variabel dependen (Belanja Modal)
a = Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Jika (+) maka arah garis naik, jika (-) maka arah garis turun.

X = Variabel independen (PAD (X_1)/DAU (X_2)/DAK (X_3))

(Sugiyono, 2012: 261)

Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

1) Menghitung nilai a dan b untuk menentukan persamaan regresi.

Rumus yang digunakan untuk memperoleh nilai a adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum Y)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

(Agus Irianto, 2009: 158)

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai b adalah sebagai berikut:

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

(Agus Irianto, 2009: 159)

2) Menghitung koefisien determinasi sederhana antara X_1, X_2., X_3 dengan Y (r^2_{x1y}, r^2_{x2y}, dan r^2_{x3y}).

Koefisien determinasi digunakan untuk melakukan penafsiran (menginterpretasikan) seberapa besar varians yang terjadi pada variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (Irianto, 2009: 167). Koefisien korelasi (r_{x1y}, r_{x2y}, dan r_{x3y}) merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan

antara variabel (Sugiyono, 2012: 224). Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi ($r_{x1y}, r_{x2y}, \text{dan } r_{x3y}$). Rumus perhitungan untuk koefisien korelasi ($r_{x1y}, r_{x2y}, \text{dan } r_{x3y}$) adalah:

$$r_{xiy} = \sum \frac{\{(X - \overline{X})(Y - \overline{Y}\}}{\sqrt{\sum(X - \overline{X})^2 \sum(Y - \overline{Y})^2}}$$

(Agus Irianto, 2009: 136)

Dalam analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi ($r^2_{x1y}, r^2_{x2y}, \text{dan } r^2_{x3y}$) digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x1y}, r^2_{x2y}, \text{dan } r^2_{x3y}$) berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ($r^2_{x1y}, r^2_{x2y}, \text{dan } r^2_{x3y}$) maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi ($r^2_{x1y}, r^2_{x2y}, \text{dan } r^2_{x3y}$) maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen terbatas.

3) Menguji signifikansi dengan uji t.

Menurut Widarjono (2010: 19) uji signifikansi (*significant test*) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Belanja Modal) dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai alpha (α) yang telah ditentukan. α merupakan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil α berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar dan semakin besar α berarti semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar. Dalam praktiknya, α biasanya ditentukan secara arbiter, yaitu 1%, 5% dan maksimum 10% (Widarjono, 2010: 28). Rumus yang digunakan untuk melakukan uji siginifikansi (uji t) adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:
t = t hitung
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

(Sugiyono, 2012: 230)

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk meramalkan (menjelaskan) antara satu varabel dependen dengan lebih dari satu variabel dependen. Persamaan yang umum

digunakan dalam analisis regresi untuk tiga variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:
Y = Variabel dependen (Belanja Modal)
X_1 = Variabel independen pertama (Pendapatan Asli Daerah)
X_2 = Variabel independen kedua (Dana Alokasi Umum)
X_3 = Variabel independen ketiga (Dana Alokasi Khusus)
b_1 = Koefisien regresi variabel X_1
b_2 = Koefisien regresi variabel X_2
b_3 = Koefisien regresi variabel X_3

(Sugiyono, 2012: 275)

Langkah-langkah dalam perhitungan analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

1) Menghitung nilai a, b_1, b_2, dan b_3 untuk menentukan persamaan regresi.

   Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai a adalah sebagai berikut:

$$a = \bar{Y} - b_1\bar{X}_1 - b_2\bar{X}_2 - b_3\bar{X}_3$$

(Agus Irianto, 2009: 195)

   Persamaan yang digunakan untuk memperoleh nilai b_1, b_2 dan b_3 adalah:

$$\sum X_1Y = b_1 \sum {X_1}^2 + b_2 \sum X_1X_2 + b_3 \sum X_1X_3$$

$$\sum X_2Y = b_1 \sum X_1X_2 + b_2 \sum X_2X_2 + b_3 \sum X_2X_3$$

$$\sum X_3Y = b_1 \sum X_1X_3 + b_2 \sum X_2X_3 + b_3 \sum {X_3}^2$$

2) Menghitung koefisien determinasi regresi linear berganda ($R^2_{y(1,2,3)}$).

Koefisien determinasi regresi linear berganda ($R^2_{y(1,2,3)}$) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara variabel independen dengan dependen. Koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) linear berganda merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) berganda. Persamaan dari koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) linear berganda adalah sebagai berikut:

$$R_{Y(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

$R_{Y(1,2,3)}$ = Koefisien korelasi regresi berganda dengan tiga variabel independen.
b_1 = Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah.
b_2 = Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum.
b_3 = Koefisien korelasi variabel Dana Alokasi Khusus.
X_1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah
X_2 = Variabel Dana Alokasi Umum
X_3 = Variabel Dana Alokasi Khusus
Y = Variabel Belanja Modal

(Sugiyono, 2012: 286)

Analisis regresi linear berganda menggunakan koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan setiap variabel independen. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq$

($R^2_{y(1,2,3)}$) ≤ 1). Jika nikai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) semakin mendekati 1 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin baik dan jika nilai koefisien determinasi ($R^2_{x(1,2,3)}$) semakin mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin kurang baik (Widarjono, 2010: 20). Semakin tinggi koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. Jika nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3) Menguji signifikansi regresi berganda menggunakan uji F.

Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji F. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3)) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Belanja Modal (Y)) dilakukan dengan uji F. Supriyadi (2014: 58) juga menjelaskan bahwa untuk menguji

signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F pada tabel ANOVA dan membandingkannya dengan nilai alpha (α) yang ditentukan (umumnya nilai α yang digunakan 0,01; 0,05; 0,10). Persamaan yang digunakan dalam pengujian signifikansi dalam analisis regresi linear berganda (uji F) adalah:

$$F_h = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:
F_h = Harga F garis regresi.
k = Jumlah variabel bebas.
n = Jumlah sampel.
R^2 = Koefisien determinasi regresi berganda.

(Sugiyono, 2012: 235)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah administrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi menjadi lima kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438 desa/kelurahan. Daerah dengan luas wilayah terluas adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1.485,4 km^2 atau 46,6 persen dari keseluruhan luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta denga luas wilayah 32,5 km^2 atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) selaku legislatif. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih melalui proses penetapan Sultan Yogyakarta yang bertahta

sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur sebagai implementasi undang-undang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 5 (lima) kabupaten/kota. Lima kabupaten/kota tersebut terdiri dari:

1) Kabupaten Kulon Progo
2) Kabupaten Bantul
3) Kabupaten Gunungkidul
4) Kabupaten Sleman
5) Kota Yogyakarta

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Data tersebut telah disesuaikan dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul asli yang diperoleh dari bagian anggaran Badan Keuangan dan Aset Daeah (BKAD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 2010 sampai dengan 2016 dan diyakini bahwa data dan nominal yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik adalah benar-benar sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang asli. Data realisasi APBD Pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul terlampir.

2. Data Khusus

Penelitian ini menggunakan empat data, yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal. Deskripsi data mengenai keempat data tersebut diperlukan sebelum melakukan melakukan pengujian antara variabel independen dengan variabel dependen. Deskripsi data tersebut meliputi jumlah data, nilai maksimum (*maximum*), nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*deviation standard*) dari setiap variabel yang digunakan.

Data khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	48.589.685	411.293.618	41.614.100	46.582.089
2	Bantul	81.637.099	573.512.337	60.565.500	123.249.280
3	Gunungkidul	42.542.031	521.293.704	77.574.200	47.001.129
4	Sleman	163.056.459	563.320.892	69.847.300	99.812.269
5	Kota Yogyakarta	179.423.640	395.444.062	13.599.100	54.040.432

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	53.752.294	444.043.865	48.336.500	105.604.886
2	Bantul	128.896.456	625.060.827	45.919.200	119.417.030
3	Gunungkidul	54.426.419	572.008.916	59.156.800	111.021.474
4	Sleman	226.686.250	631.920.733	42.650.300	96.111.399
5	Kota Yogyakarta	228.870.562	436.129.821	1.761.900	59.151.113

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	74.028.664	531.104.016	45.379.520	147.830.580
2	Bantul	166.597.778	768.034.584	63.281.450	140.106.753
3	Gunungkidul	67.050.782	687.944.489	70.584.420	164.360.940
4	Sleman	301.069.539	795.708.767	52.237.390	132.536.252
5	Kota Yogyakarta	338.839.606	536.466.614	6.485.350	88.335.891

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	95.991.513	594.978.790	52.894.140	123.313.525
2	Bantul	224.197.864	854.810.634	47.196.880	183.269.840
3	Gunungkidul	83.427.448	779.069.238	59.793.058	156.373.178
4	Sleman	449.270.306	891.589.912	50.823.330	206.859.866
5	Kota Yogyakarta	383.052.140	597.212.209	6.220.630	167.079.742

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	158.623.927	639.409.211	47.077.300	146.576.953
2	Bantul	357.411.064	949.252.188	60.914.370	310.415.291
3	Gunungkidul	159.304.338	847.388.294	46.172.145	127.289.722
4	Sleman	577.380.071	952.102.502	48.673.210	265.485.461
5	Kota Yogyakarta	470.634.763	618.742.253	2.249.900	193.078.280

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	170.822.327	657.260.489	53.806.400	226.055.713
2	Bantul	390.624.492	942.850.827	72.359.660	334.880.395
3	Gunungkidul	196.099.245	872.566.961	84.971.370	238.175.034
4	Sleman	643.130.080	984.410.612	57.469.896	426.782.827
5	Kota Yogyakarta	510.548.823	622.365.351	2.342.700	256.395.157

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	Kulon Progo	180.273.364	718.490.508	212.673.879	241.983.753
2	Bantul	404.454.704	999.814.365	99.372.455	284.060.533
3	Gunungkidul	206.278.865	954.997.369	253.996.628	234.690.533
4	Sleman	717.151.176	1.014.310.630	240.745.571	344.002.326
5	Kota Yogyakarta	540.504.300	670.278.830	151.641.280	259.589.340

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Dari data sekunder tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal tahun 2010-2016 yang telah dikumpulkan, maka deskripsi data dari variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)

Variabel	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	Standar Deviasi
Pendapatan Asli Daerah	35	42.542.031	717.151.176	259.275.659,3	185.816.341,9
Dana Alokasi Umum	35	395.444.062	1.014.310.630	704.433.954,8	184.042.653,1
Dana Alokasi Khusus	35	1.761.900	253.996.628	67.153.938,06	60.174.829,29
Belanja Modal	35	46.582.089	426.782.827	178.900.542,5	92.398.011,79
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Data sekunder diolah, 2017

Tabel di atas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui bahwa jumlah populasi Belanja Modal yang diteliti sebanyak 35 (tiga puluh lima). Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimal sebesar Rp 46.582.089.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Belanja Modal adalah sebesar Rp 426.782.827.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2015. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Belanja Modal adalah 178.900.542,5 sedangkan nilai standar deviasi variabel Belanja Modal adalah 92.398.011,79. Data mengenai urutan alokasi Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi sampai dengan terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota	No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota
1	426.782.827	2015	Sleman	19	147.830.580	2012	Kulon Progo
2	344.002.326	2016	Sleman	20	146.576.953	2014	Kulon Progo
3	334.880.395	2015	Bantul	21	140.106.753	2012	Bantul
4	310.415.291	2014	Bantul	22	132.536.252	2012	Sleman
5	284.060.533	2016	Bantul	23	127.289.722	2014	Gunungkidul
6	265.485.461	2014	Sleman	24	123.313.525	2013	Kulon Progo
7	259.589.340	2016	Kota Yogyakarta	25	123.249.280	2010	Bantul
8	256.395.157	2015	Kota Yogyakarta	26	119.417.030	2011	Bantul
9	241.983.753	2016	Kulon Progo	27	111.021.474	2011	Gunungkidul
10	238.175.034	2015	Gunungkidul	28	105.604.886	2011	Kulon Progo
11	234.690.533	2016	Gunungkidul	29	99.812.269	2010	Sleman
12	226.055.713	2015	Kulon Progo	30	96.111.399	2011	Sleman
13	206.859.866	2013	Sleman	31	88.335.891	2012	Kota Yogyakarta
14	193.078.280	2014	Kota Yogyakarta	32	59.151.113	2011	Kota Yogyakarta
15	183.269.840	2013	Bantul	33	54.040.432	2010	Kota Yogyakarta
16	167.079.742	2013	Kota Yogyakarta	34	47.001.129	2010	Gunungkidul
17	164.360.940	2012	Gunungkidul	35	46.582.089	2010	Kulon Progo
18	156.373.178	2013	Gunungkidul				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2017.

b. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui bahwa jumlah populasi Pendapatan Asli Daerah yang diteliti sebanyak 35 (tiga puluh lima). Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp 42.542.031.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 717.151.176.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 259. 275.659,3 sedangkan nilai standar deviasi variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 185.816.341,9. Data mengenai urutan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tertinggi sampai dengan

terendah tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Tertinggi ke Terendah Tahun 2010-2016

No	PAD	Tahun	Kab/Kota	No	PAD	Tahun	Kab/Kota
1	717.151.176	2016	Sleman	19	180.273.364	2016	Kulon Progo
2	643.130.080	2015	Sleman	20	179.423.640	2010	Kota Yogyakarta
3	577.380.071	2014	Sleman	21	170.822.327	2015	Kulon Progo
4	540.504.300	2016	Kota Yogyakarta	22	166.597.778	2012	Bantul
5	510.548.823	2015	Kota Yogyakarta	23	163.056.459	2010	Sleman
6	470.634.763	2014	Kota Yogyakarta	24	159.304.338	2014	Gunungkidul
7	449.270.306	2013	Sleman	25	158.623.927	2014	Kulon Progo
8	404.454.704	2016	Bantul	26	128.896.456	2011	Bantul
9	390.624.492	2015	Bantul	27	95.991.513	2013	Kulon Progo
10	383.052.140	2013	Kota Yogyakarta	28	83.427.448	2013	Gunungkidul
11	357.411.064	2014	Bantul	29	81.637.099	2010	Bantul
12	338.839.606	2012	Kota Yogyakarta	30	74.028.664	2012	Kulon Progo
13	301.069.539	2012	Sleman	31	67.050.782	2012	Gunungkidul
14	228.870.562	2011	Kota Yogyakarta	32	54.426.419	2011	Gunungkidul
15	226.686.250	2011	Sleman	33	53.752.294	2011	Kulon Progo
16	224.197.864	2013	Bantul	34	48.589.685	2010	Kulon Progo
17	206.278.865	2016	Gunungkidul	35	42.542.031	2010	Gunungkidul
18	196.099.245	2015	Gunungkidul				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

c. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Umum yang diteliti sebanyak 35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimal sebesar Rp 395.444.062.000,- yang diperoleh dari Kota Yogyakarta pada tahun 2010. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi Umum adalah sebesar Rp 1.014.310.630.000,- yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel

Dana Alokasi Umum adalah 704.433.954,3 sedangkan nilai standar deviasi variabel Dana Alokasi Umum adalah 184.042653,1. Data mengenai urutan penerimaan Dana Alokasi Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut.

Tabel 13. Penerimaan Dana Alokasi Umum dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	DAU	Tahun	Kab/Kota	No	DAU	Tahun	Kab/Kota
1	1.014.310.630	2016	Sleman	19	639.409.211	2014	Kulon Progo
2	999.814.365	2016	Bantul	20	631.920.733	2011	Sleman
3	984.410.612	2015	Sleman	21	625.060.827	2011	Bantul
4	954.997.369	2016	Gunungkidul	22	622.365.351	2015	Kota Yogyakarta
5	952.102.502	2014	Sleman	23	618.742.253	2014	Kota Yogyakarta
6	949.252.188	2014	Bantul	24	597.212.209	2013	Kota Yogyakarta
7	942.850.827	2015	Bantul	25	594.978.790	2013	Kulon Progo
8	891.589.912	2013	Sleman	26	573.512.337	2010	Bantul
9	872.566.961	2015	Gunungkidul	27	572.008.916	2011	Gunungkidul
10	854.810.634	2013	Bantul	28	563.320.892	2010	Sleman
11	847.388.294	2014	Gunungkidul	29	536.466.614	2012	Kota Yogyakarta
12	795.708.767	2012	Sleman	30	531.104.016	2012	Kulon Progo
13	779.069.238	2013	Gunungkidul	31	521.293.704	2010	Gunungkidul
14	768.034.584	2012	Bantul	32	444.043.865	2011	Kulon Progo
15	718.490.508	2016	Kulon Progo	33	436.129.821	2011	Kota Yogyakarta
16	687.944.489	2012	Gunungkidul	34	411.293.618	2010	Kulon Progo
17	670.278.830	2016	Kota Yogyakarta	35	395.444.062	2010	Kota Yogyakarta
18	657.260.489	2015	Kulon Progo				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

d. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif data penelitian, diketahui bahwa jumlah populasi Dana Alokasi Khusus yang diteliti sebanyak 35 (tiga puluh lima). Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai

minimal sebesar Rp 1.761.900,- yang diperoleh dari Kota Yogyakarta pada tahun 2011. Nilai maksimal variabel Dana Alokasi Khusus adalah sebesar Rp 253.996.628,- yang diperoleh dari Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Dana Alokasi Khusus adalah 67.153.938,06 sedangkan nilai standar deviasi variabel Dana Alokasi Khusus adalah 60.174.829,29. Data mengenai penerimaan Dana Alokasi Khusus dari tertinggi ke terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Tertinggi ke Terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016

No	DAK	Tahun	Kab/Kota	No	DAK	Tahun	Kab/Kota
1	253.996.628	2016	Gunungkidul	19	52.237.390	2012	Sleman
2	240.745.571	2016	Sleman	20	50.823.330	2013	Sleman
3	212.673.879	2016	Kulon Progo	21	48.673.210	2014	Sleman
4	151.641.280	2016	Kota Yogyakarta	22	48.336.500	2011	Kulon Progo
5	99.372.455	2016	Bantul	23	47.196.880	2013	Bantul
6	84.971.370	2015	Gunungkidul	24	47.077.300	2014	Kulon Progo
7	77.574.200	2010	Gunungkidul	25	46.172.145	2014	Gunungkidul
8	72.359.660	2015	Bantul	26	45.919.200	2011	Bantul
9	70.584.420	2012	Gunungkidul	27	45.379.520	2012	Kulon Progo
10	69.847.300	2010	Sleman	28	42.650.300	2011	Sleman
11	63.281.450	2012	Bantul	29	41.614.100	2010	Kulon Progo
12	60.914.370	2014	Bantul	30	13.599.100	2010	Kota Yogyakarta
13	60.565.500	2010	Bantul	31	6.485.350	2012	Kota Yogyakarta
14	59.793.058	2013	Gunungkidul	32	6.220.630	2013	Kota Yogyakarta
15	59.156.800	2011	Gunungkidul	33	2.342.700	2015	Kota Yogyakarta
16	57.469.896	2015	Sleman	34	2.249.900	2014	Kota Yogyakarta
17	53.806.400	2015	Kulon Progo	35	1.761.900	2011	Kota Yogyakarta
18	52.894.140	2013	Kulon Progo				

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan koefisien korelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Koefisien Korelasi

Variabel Independen	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana Alokasi Khusus (X_3)
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	1	0,564	0,164
Dana Alokasi Umum (X_2)	0,564	1	0,472
Dana Alokasi Khusus (X_3)	0,164	0,472	1

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Tabel 15 di atas menjelaskan bahwa variabel-variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terbebas dari gejala multikolinearitas atau dengan kata lain antara variabel independen tidak terdapat hubungan yang kuat. Dalam uji multikolinearitas, dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,7 (> 0,7), sedangkan jika koefisien korelasi antara variabel independen lebih kecil dari 0,7 (< 0,7) maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dalam tabel 12 terlihat bahwa korelasi antar

variabel bebas (independen) secara keseluruhan lebih kecil dari 0,7 sehingga dapat dikatakan bahwa antar variabel bebas (independen) tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Hasil dari uji multikolinearitas dengan metode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Uji Mulitikolinearitas dengan VIF dan *Tolerance*

Model		T	Sig.	*Collinearity Statistics*	
				Tolerance	VIF
1	(*Constant*)	-2,097	0,044		
	Pendapatan Asli Daerah	4,206	0,000	0,669	1,495
	Dana Alokasi Umum	4,379	0,000	0,534	1,873
	Dana Alokasi Khusus	1,199	0,240	0,762	1,313

Dependent variabel: Belanja Modal
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Tabel 16 di atas menjelaskan bahwa antara variabel bebas (independen) tidak terjadi multikollinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10 (> 10) maka dikatakan terdapat multikolinearitas, sedangkan jika VIF lebih kecil dari 10 (< 10) maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13 terlihat bahwa nilai VIF Pendapatan Asli Daerah 1,495, lebih kecil dari 10 (1,495 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Dana Alokasi Umum adalah 1,873, lebih kecil dari 10 (1,873 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Dana Alokasi Khusus adalah 1,313, lebih kecil dari 10 (1,313 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (Tol > 0,10) maka dikatakan tidak terjadi

multikolinearitas, sedangkan jika nilai *Tolerance* (Tol < 0,10) maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 13, nilai *Tolerance* Pendapatan Asli Daerah adalah 0,669, lebih besar dari 0,10 (0,669 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* Dana Alokasi Umum adalah 0,534, lebih besar dari 0,10 (0,534 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *Tolerance* Dana Alokasi Khusus adalah 0,762, lebih besar dari 0,10 (0,762 > 0,10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara pengujian heteroskedastisitas dapat dillakukan dengan tiga cara, yaitu:

a) Metode grafik (*Scatterplot*)

Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel estimasi variabel dependen atau Y estimate (sebagai sumbu datar) dengan variabel sisaan residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola pada grafik berbentuk random atau acak, maka dikatakan persamaan regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode garfik *Scatterplot* adalah sebagai berikut:

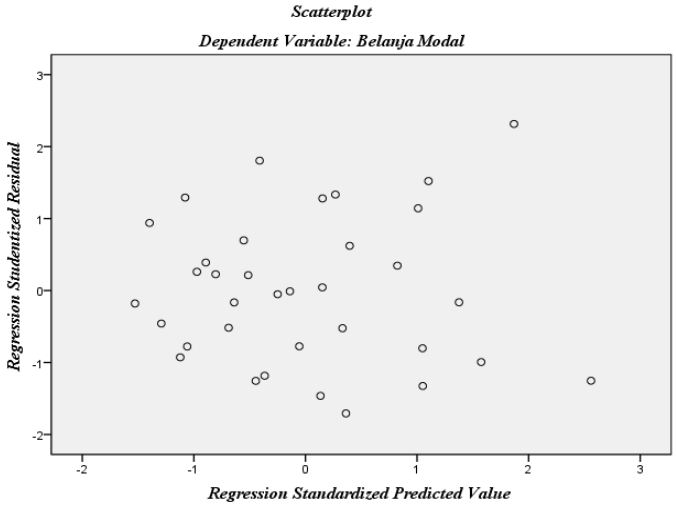

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Gambar 3. Grafik *Scatterplot* Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa titik-titik (*plot*) menyebar secara random (acak) serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (*plot*) tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik data juga tidak hanya mengumpu; di atas atau di bawah saja, selain itu titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit kemudian melebar kembali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

b) Uji *Rank Spearman*

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Rank Spearman* adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji heteroskedastisitas dengan Uji *Rank Spearman*

			Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	*Unstand-ardized Residual*
Spearman's rho	Pendapatan Asli Daerah	*Correlation Coefficient*	1,000	0,573	0,003	-0,092
		Sig. (2-tailed)	.	0,000	0,986	0,601
		N	35	35	35	35
	Dana Alokasi Umum	*Correlation Coefficient*	0,573	1,000	0,542	-0,032
		Sig. (2-tailed)	0,000	.	0,001	0,857
		N	35	35	35	35
	Dana Alokasi Khusus	*Correlation Coefficient*	0,003	0,542	1,000	0,154
		Sig. (2-tailed)	0,986	0,001	.	0,378
		N	35	35	35	35
	Unstandar-ized Residual	*Correlation Coefficient*	-0,092	-0,032	0,154	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,601	0,857	0,378	.
		N	35	35	35	35

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji *Rank Spearman* adalah jika nilai signifikansi (2-*tailed*) lebih besar dari 0,05 (p > 0,05) maka variabel independen tidak menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi (2-*tailed*) lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) maka variabel independen menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-*tailed*) Pendapatan Asli Daerah adalah 0,601, nilai sig. (2-*tailed*) Dana Alokasi Umum adalah 0,857 dan nilai sig. (2-*tailed*) Dana Alokasi Khusus adalah 0,378. Secara keseluruhan nilai signifikansi (2-*tailed*) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

c) Uji *Park*

Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan uji *Park* adalah sebagai berikut:

Tabel 18: Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Park*

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*	T	Sig.
		B	*Std. Error*	Beta		
1	(*Constant*)	19,435	37,969		0,512	0,612
	Lnx1	0,535	0,779	0,182	0,687	0,497
	Lnx2	-0,309	2,620	-0,035	-0,118	0,907
	Lnx3	0,600	0,489	0,306	1,228	0,229
a. *Dependent Variable*: Lnei2						

Keterangan:
Lnei2 : Logaritma Natural Data Residual
Lnx1 : Logaritma Natural Pendapatan Asli Daerah
Lnx2 : Logaritma Natural Dana Alokasi Umum
Lnx3 : Logaritma Natural Dana Alokasi Khusus
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Uji heteroskedastisitas dengan uji *Park* dilakukan dengan meregresikan antara nilai Ln kuadrat *unstandarized residual* dengan nilai Ln variabel independen. Jika nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan (p) lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen menyebabkan masalah heteroskedastisitas. Hasil uji *Park* pada tabel 15 terlihat bahwa nilai signifikansi Lnx1 (Pendapatan Asli Daerah) adalah 0,497; nilai signifikansi Lnx2 (Dana Alokasi Umum) adalah 0,907 dan nilai signifikansi Lnx3 (Dana Alokasi Khusus) adalah 0,229. Secara keseluruhan nilai signifikansi (p) lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel independen tidak menyebabkan masalah heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t (periode tertentu) dengan periode t-1 (periode sebelumnya). Persamaan regresi yang baik merupakan persamaan yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Salah satu cara untuk melakukan pengujian autokorelari adalah dengan menggunakan uji *Run Test*. Hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Run Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 19: Hasil Uji Autokorelasi Metode *Run Test*

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-2.190.174,94894
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	20
Z	0,348
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,728
a. *Median*	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Cara pengambilan keputusan uji autokorelasi metode *Run Test* adalah jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi. Jika nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah autokorelasi. Berdasarkan tabel 16 hasil uji autokorelasi dengan metode *Run Test*, diperoleh hasil *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar

0,728. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (0,728 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Sederhana

a) Uji Hipotesis Pertama

Uji hipotesis pertama merupakan analisis regresi sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y)

Variabel Independen	Kostanta	Koefisien Regresi	r_{x1y}	$r^2{}_{x1y}$	t	Sig.	Keterangan
PAD	83.622.288,473	0,367	0,739	0,546	6,302	0,00	Positif - Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh dari tabel 20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap

Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 83.622.288,473, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 0,367, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = 83.622.288,473 + 0,367X_1$$

Nilai konstanta sebesar 83.622.288,473 menyatakan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) sama dengan 0 maka besarnya nilai Belanja Modal adalah 83.622.288,473. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,367, sehingga jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) meningkat sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan meningkat sebesar 36,7%.

(2) Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x1y}) diperoleh dari tabel 20 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana anatara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) yang diperoleh sebesar 0,739 mengandung arti bahwa besarnya korelasi atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,739. Koefisien korelasi (r_{x1y}) yang bernilai positif (0,739) berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh secara positif

terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) yang diperoleh sebesar 0,546 mengandung arti bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 54,6 % (persen) sedangakan 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi dari tabel 20 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 17 sebesar 6,302 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N = 35 dan k = 3 (t tabel =$t_{(\alpha/2\,;\,N-k-1)}$ = $t_{(0{,}05/2\,;\,35-3-1)}$ = $t_{(0{,}025\,;\,31)}$→dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah sebesar 2,040. Nilai t hitung 6,302 lebih besar dari nilai t tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama, yaitu terdapat pengaruh positif Pendapatan

Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,739 yang bernilai positif menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sebesar 0,739 (73,9%). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,546 menyatakan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 54,6% sedangkan 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 6,302 yang lebih besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

b) Uji Hipotesis Kedua

Uji hipotesis kedua merupakan analisis regresi linear sederhana antara dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y). Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Variabel Independen	Konstanta	Koefisien Regresi	r_{x2y}	r^2_{x2y}	t	Sig.	Keterangan
DAU	106.174.150,496	0,405	0,806	0,650	7,824	0,000	Positif - Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh dari tabel 21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 106.174.150,496, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 0,405, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = 106.174.150,496 + 0,405X_2$$

Nilai konstanta sebesar 106.174.150,496 menyatakan bahwa jika Dana Alokasi Umum (X_2) sama dengan 0 maka besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah 106.174.150,496. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,405,

sehingga jika Dana Alokasi Umum (X_2) meningkat sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 40,5%.

(2) Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x2y}) diperoleh dari tabel 21 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap variabel Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) yang diperoleh sebesar 0,806 mengandung arti bahwa besarnya korelasi atau hubungan antara Dana Alokasi Umum (X_2) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,806. Koefisien korelasi (r_{x2y}) yang bernilai positif (0,806) berarti bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh secara positif terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) yang diperoleh sebesar 0,650 mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (X_2) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65% sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lain diluar persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi dari tabel 21 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana

Alokasi Umum (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 18 sebesar 7,824 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N = 35 dan k = 3 (t tabel = $t_{(\alpha/2\,;\,N-k-1)}$ = $t_{(0,05/2\,;\,35-3-1)}$ = $t_{(0,025\,;\,31)}$→dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah sebesar 2,040. Nilai t hitung 7,824 lebih besar dari nilai t tabel 2,040 (t hitung 6,302 > t tabel 2,040) sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,806 yang bernilai positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806 (80,6%). Nilai koefisiean determinasi ($r^2{}_{x2y}$) sebesar 0,650 berarti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Umum (X_2) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65%,

sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 7,824 yang lebih besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

c) Uji Hipotesis Ketiga

Uji hipotesis ketiga dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y). Hasil dari pengujian analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y).

Variabel Independen	Konstanta	Koefisien Regresi	r_{x3y}	r^2_{x3y}	t	Sig.	Keterangan
DAK	134.901.677,986	0,655	0,427	0,182	2,710	0,011	Positif - Signifikan

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017.

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(1) Nilai a (konstanta) dan b (koefisien regresi) untuk menentukan persamaan regresi. Nilai a dan b diperoleh dari tabel 22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap

Belanja Modal (Y). Nilai a yang diperoleh sebesar 134.901.677,986, sedangkan nilai b yang diperoleh sebesar 0,655, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = 134.901.677,986 + 0,655X_3$$

Nilai konstanta sebesar 134.901677,986 menyatakan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (X_3) sama dengan 0 maka besarnya nilai Belanja Modal (Y) adalah 134.901.677,986. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,655, sehingga jika Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 1% maka besarnya Belanja Modal akan meningkat sebesar 65,5%.

(2) Nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x3y}) diperoleh dari tabel 22 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap variabel Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) yang diperoleh sebesar 0,427 mengandung arti bahwa besarnya korelasi atau hubungan antara Dana Alokasi Khusus (X_3) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,427. Koefisien korelasi (r_{x3y}) yang bernilai positif (0,427) berarti bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh

secara positif terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) yang diperoleh sebesar 0,182 mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Khusus (X_3) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 18,2% sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar persamaan regresi.

(3) Pengujian signifikasi antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai signifikansi dari tabel 22 adalah sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 (0,011 < 0,05) mengandung arti bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai t hitung yang diperoleh dari tabel 22 sebesar 2,710 sementara nilai t tabel untuk α = 0,05; N = 35 dan k = 3 (t tabel = $t_{(\alpha/2\,;\,N-k-1)}$ = $t_{(0{,}05/2\,;\,35-3-1)}$ = $t_{(0{,}025\,;\,31)}$→dilihat di distribusi nilai t tabel) adalah sebesar 2,040. Nilai t hitung 2,710 lebih besar dari nilai t tabel 2,040 (t hitung 2,710 > t tabel 2,040) sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear sederhana antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga, yaitu terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus

terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,011 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,427 yang bernilai positif menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 (42,7%). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,182 mengandung arti bahwa besarnya kemampuan Dana Alokasi Khusus (X_3) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah 18,2% sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar persamaan regresi. Nilai t hitung sebesar 2,710 yang lebih besar dari t tabel 2,040 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

2) Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dengan tiga variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal). Hasil dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi khusus (X_3) Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y).

Variabel Independen	Konstanta	Koefisien Regresi	$R_{y(1,2,3)}$	$R^2{}_{y(1,2,3)}$	F	Sig.	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	-68.134.988,924	0,216	0,882	0,779	36,368	0,000	Positif - Signifikan
Dana Alokasi Umum		0,254					
Dana Alokasi Khusus		0,178					

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear sederhana antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai a (konstanta), b_1 (koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah), b_2 (koefisien regresi Dana Alokasi Umum) dan b_3 (koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) diperoleh dari tabel 23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y). Nilai a (konstanta) yag diperoleh dari tabel 23 adalah sebesar -68.134.988,924. Nilai b_1 (koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah) yang diperoleh dari tabel 23 adalah 0,216. Nilai b_2 (koefisien regresi Dana

Alokasi Umum) yang diperoleh dari tabel 23 adalah 0,254. Nilai b_3 (koefisien regresi Dana Alokasi Khusus) adalah 0,178. Berdasarkan nilai a, b_1, b_2 dan b_3 yang telah di peroleh berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi linear berganda, maka persamaan regresi linear berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3), secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = -68.134.988,924 + 0,216X_1 + 0,254X_2 + 0,178X_3$$

Konstanta (a) dari persamaan regresi sebesar -68.134.988.924 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) atau variabel independen = 0, maka besarnya Belanja Modal tiap daerah sebesar -68.134.988,924. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (b_1) sebesar 0,216 berarti jika Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 1% maka akan menambah Belanja Modal sebesar 21,6%. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (b_2) sebesar 0,254 berarti jika Dana Alokasi Umum bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 25,4%. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (b_3) sebesar 0,178 berarti jika Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar 1% maka akan meningkatkan Belanja Modal sebesar 17,8%.

b) Koefisien korelasi regresi linear berganda ($R^2_{y(1,2,3)}$) yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) diperoleh dari tabel 23 tentang ringkasan hasil analisis regresi linear berganda. Nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) yang diperoleh adalah sebesar 0,882 berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh positif terhadap Belanja modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) yang diperoleh adalah sebesar 0,779, berarti kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen adalah sebesar 77,9%, sedangkan sisanya sebesar 22,1% dideskripsikan oleh faktor-faktor lain di luar variabel dalam persamaan regresi.

c) Pengujian signifikansi analisis regresi linear berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F. Nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 36,368, sedangkan nilai F tabel untuk N = 35,

k = 3 dan α = 0,05 (F tabel = $F_{(k;N-k)}$= $F_{(3;35-3)}$= $F_{(3;32)}$→ lihat nilai F tabel di distribusi nilai F tabel) adalah sebesar 2,92. Nilai F hitung 36,368 lebih besar dari F tabel 2,92 (F hitung 36,368 > F tabel 2,92), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Berdasarkan interpretasi hasil analisis regresi linear berganda antara Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama (simultan) terhadap Belanja Modal (Y) maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat, yaitu terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 diterima. Nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menyatakan bahwa bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Nilai koefisien korelasi ($R_{yx(1,2,3)}$) sebesar 0,882 yang bernilai positif menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai F hitung

sebesar 36,368 yang lebih besar dari F tabel 2,92 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil pengujian hipotesis data dari tahun 2010 sampai dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis pertama diterima. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 83.622.288,473 dan koefisien regresi (b) sebesar 0,367 sehingga persamaan regresi untuk mengetahui hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 adalah Y = 83.622.288,473 + 0,367X_1**.** Persamaan tersebut memiliki arti jika jika Pendapatan Asli Daerah (X_1) naik satu persen (1%) maka Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 0,367 (36,7%). Hasil pengujian menunjukkan koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016

adalah positif sebesar 0,739 (73,9%). Koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,546 menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (X_1) dalam mendiskirpsikan (menjelaskan) Belanja Modal (Y) adalah sebesar 54,6 persen. Selanjutnya untuk pengujian signifikansi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung yang diperoleh sebesar 6,302 lebih besar dari t tabel sebesar 2,040 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing yang harus selalu ditingkatkan dalam rangka pembiayaan pengeluaran daerah terumata untuk Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin rendah (turun).

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,375, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) 0,141, nilai t hitung 4,612 > t tabel 1,15685 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Anjar Guritno dan Leny Suzan (2014) yang menyatakan Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (b) sebesar 1,015 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data yang diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini diterima. Nilai konstanta (a) yang di peroleh adalah sebesar 106.174.150,496 sedangkan nilai koefisen regresi (b) yang diperoleh sebesar 0,405, sehingga persamaan regresi untuk mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Umum (X_2) dan Belanja Modal (Y) dari tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah Y = 106.174.150,496 + 0,405X_2. Dari

persamaan tersebut diketahui bahwa jika Dana Alokasi Umum (X_2) meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,405 (40,5%). Nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,806 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,806 (80,6%). Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,650 mengandung arti bahwa kemampuan Dana Alokasi Umum (X_2) dalam memprediksikan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 65% sedangkan 35% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar persamaan regresi. Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan uji t. Nilai t hitung yang diperoleh dari pengujian adalah 7,824 lebih besar dari t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menggambarkan bahwa Dana Alokasi Umum (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluran daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Umum yang di terima pemerintah daerah, maka Belanja Modal akan semakin rendah. Walaupun demikian, jika besarnya Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta semakin ditingkatkan maka akan berimbas pada tingkat ketergantungan yang tinggi oleh daerah kepada pemerintah pusat, sehingga tingkat kemandirian daerah rendah.

Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Fiona Puspita Devi Purwanto yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaru postif terhadap Belanja Modal namun tidak siginifikan. Ada sedikit perbedaan dari hasil yang diperoleh disebabkan oleh peningkatan Dana Alokasi Umum dari setiap daerah berbeda-beda sehingga menyebabkan signifikan atau tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah Terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016 menggunakan analisis regresi linear sederhana menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal (Y), sehingga hipotesis ketiga dari peneltian ini diterima. Nilai konstanta (a) yang di dapat sebesar 134.901.677,986 sedangkan koefisien regresi (b) sebesar 0,655 sehingga persamaan regresi yang dihasilkan untuk mengetahui hubungan antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah Y = 134.901.677,986 + 0,655X_3. Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa jika Dana Alokasi Khusus (X_3) meningkat sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,655 (65,5%). Nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) antara Dana Alokasi Khusus (X_3) dan Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,427 (42,7%). Koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,182 menunjukkan bahwa kemampuan Dana Alokasi Khusus (X_3) dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 18,2%, sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi. Pengujian siginifikansi antara Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji t. Nilai t hitung yang di dapat dari pengujian sebesar 2,710 lebih besar dari t tabel 2,040 dengan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat selain Dana Alokasi Umum yang tujukan untuk tujuan khusus untuk meningkatkan pelayanan publik dengan mengalokasikan dana tersebut ke

Belanja Modal pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta tahun 2010-2016. Semakin tinggi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Semakin rendah Dana Alokasi Khusus yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Abdul Halim (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asi Daerah (PAD) bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan sehingga Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil pengujian yang telah dilakukan menyatakan bahwa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016 adalah positif.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Umum Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hasil dari pengujian data dari tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 sampai dengan 2016. Nilai konstanta (a) dari hasil pengujian adalah sebesar -68.134.988.924, sedangkan nilai koefisien regresi (b_1) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,216, nilai koefisien regresi (b_2) Dana Alokasi Umum sebesar 0,254 dan nilai koefisien regresi (b_3) Dana Alokasi Khusus sebesar 0,178. Dari nilai konstanta dan koefisien regresi yang diperoleh tersebut, maka persamaan regresi yang dapat digunakan adalah Y = -68.134.988.924 + 0,216X_1+ 0,254X_2+ 0,178X_3. Persamaan regresi tersebut mengandung arti bahwa jika masing-masing variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3)) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka Belanja Modal (Y) juga akan mengalami peningkatan sejumlah koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. Nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,882 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y) sebesar 0,882 (88,2%). Nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,779 menunjukkan bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana

Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama dalam menjelaskan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 77,9% sedangkan 22,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar persamaan regresi berganda. Pengujian signifikansi dalam regresi berganda dilakukan dengan menggunakan uji F. Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 36,368 lebih besar dari F tabel 2,92 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara siginifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Semakin meningkat ketiga variabel tersebut, maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel untuk mendiskripsikan Belanja Modal, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Belanja Modal

dipengaruhi oleh pendapatan daerah, pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, sehingga masih banyak faktor (variabel) lain yang belum diteliti dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan Belanja Modal.

2. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, sehingga periode tahun yang digunakan dalam penelitian cukup panjang mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab iv, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) sebesar 0,739, nilai koefisien determinasi ($r^2{}_{x1y}$) sebesar 0,546 dan nilai t hitung 6,302 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) sebesar 0,806, nilai koefisien determinasi ($r^2{}_{x2y}$) sebesar 0,650 dan nilai t hitung 7,824 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) sebesar 0,427, nilai koefisien determinasi ($r^2{}_{x3y}$) sebesar 0,182 dan nilai t hitung 2,710 > t tabel 2,040 pada tingkat signifikansi 0,05.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2) dan Dana Alokasi Khusus (X_3) secara bersama-

sama terhadap Belanja modal (Y) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,882, nilai koefisien determinasi ($R^2{}_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,779 dan nilai F hitung 36,368 > F tabel 2,92 pada tingkat signifikansi 0,05.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Telah teruji bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi Belanja Modal, sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum maka Belanja Modal semakin meningkat sehingga pemerintah daerah harus mengelola dan memanfaatkan Dana Alokasi Umum dengan seharusnya untuk kepentingan dan fasilitas publik.
3. Telah teruji bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal yang menunjukkan dengan semakin meningkatnya Dana Alokasi Khusus maka Belanja Modal semakin meningkat sehingga pemerintah harus memanfaatkan Dana Alokasi Umum yang seharusnya untuk kebutuhan dan fasilitas publik.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan impikasi di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Derah Istimewa Yogyakarta diharapkan terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga Pendapatan Asli Daerah terus menigkat dari tahun ke tahun dan alokasi Belanja Modal juga semakin meningkat serta tercipta kemadirian daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengelola dengan baik Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat agar lebih mengutamakan pengalokasian ke Belanja Modal.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang digunakan dalam penelitian agar lebih lengkap dan bervariasi. Variabel yang digunakan dapat menggunakan sektor keuangan seperti Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi ataupun sektor non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi mikro ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., & Halim, A. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali". *Jurnal Ekonomi*,13 (2): 90-109.

Afifah, N.N. (2010). *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana.

Alhamda. S. (2016). *Buku Ajar Metlit dan Statistik*. CV Budi Utama: 2016.

Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference for Transition Countries*. Paris: SIGMA-OECD. *http://www.oecd.org/sigmawe*.

Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.

Darmawanto & Yustikasari. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi*. Makasar.

Purwanto, F.P.D. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). "Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen". *Artikel*. *http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen* (diakses tanggal 26 Juli 2017, pukul 20.21)

DJPK. (2016). "Dana Alokasi Umum". *Leaflet*. *http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf* (diakses tanggal 31 Desember 2016 pukul 19.49)

DJPK. (2016). "Dana Alokasi Khusus". *Leaflet*. *http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf* (diakses tanggal 31 Desember 2016, pukul 22.47)

Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guritno, A. & Suzan, L. (2015). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008-2013". *E-Proceeding of Management*, 2 (2): 2355-9357.

Halim, A. (2008). *Akuntasi sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Haryanto & Wijayanti, S. (2015). *Statistik keuangan Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.

Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintahan (Bunga Rampai)*. Jakarta: Salemba Empat.

Irianto, A. (2009). *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

KSAP. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.*

Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, B.A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Andi: Yogyakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Prakosa, K.B. (2004). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8 (2), 1410-2420.

Republik Indonesia. (2004). *UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.*

Republik Indonesia. (2000). *UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Republik Indonesia. (2014). *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia: Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.

Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Statistik Data Analysis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.

Ulum MD, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik.* Malang: UMM PRESS.

Widarjono, A. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DATA REALISASI PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL DI PROVINSI DIY TAHUN 2010-2016

DATA REALISASI PAD, DAU, DAK DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

No	Tahun	Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
1	2010	Kulon Progo	48.589.685	411.293.618	41.614.100	46.582.089
2	2010	Bantul	81.637.099	573.512.337	60.565.500	123.249.280
3	2010	Gunungkidul	42.542.031	521.293.704	77.574.200	47.001.129
4	2010	Sleman	163.056.459	563.320.892	69.847.300	99.812.269
5	2010	Kota Yogyakarta	179.423.640	395.444.062	13.599.100	54.040.432
6	2011	Kulon Progo	53.752.294	444.043.865	48.336.500	105.604.886
7	2011	Bantul	128.896.456	625.060.827	45.919.200	119.417.030
8	2011	Gunungkidul	54.426.419	572.008.916	59.156.800	111.021.474
9	2011	Sleman	226.686.250	631.920.733	42.650.300	96.111.399
10	2011	Kota Yogyakarta	228.870.562	436.129.821	1.761.900	59.151.113
11	2012	Kulon Progo	74.028.664	531.104.016	45.379.520	147.830.580
12	2012	Bantul	166.597.778	768.034.584	63.281.450	140.106.753
13	2012	Gunungkidul	67.050.782	687.944.489	70.584.420	164.360.940
14	2012	Sleman	301.069.539	795.708.767	52.237.390	132.536.252
15	2012	Kota Yogyakarta	338.839.606	536.466.614	6.485.350	88.335.891
16	2013	Kulon Progo	95.991.513	594.978.790	52.894.140	123.313.525
17	2013	Bantul	224.197.864	854.810.634	47.196.880	183.269.840
18	2013	Gunungkidul	83.427.448	779.069.238	59.793.058	156.373.178
19	2013	Sleman	449.270.306	891.589.912	50.823.330	206.859.866
20	2013	Kota Yogyakarta	383.052.140	597.212.209	6.220.630	167.079.742
21	2014	Kulon Progo	158.623.927	639.409.211	47.077.300	146.576.953
22	2014	Bantul	357.411.064	949.252.188	60.914.370	310.415.291
23	2014	Gunungkidul	159.304.338	847.388.294	46.172.145	127.289.722
24	2014	Sleman	577.380.071	952.102.502	48.673.210	265.485.461
25	2014	Kota Yogyakarta	470.634.763	618.742.253	2.249.900	193.078.280
26	2015	Kulon Progo	170.822.327	657.260.489	53.806.400	226.055.713
27	2015	Bantul	390.624.492	942.850.827	72.359.660	334.880.395
28	2015	Gunungkidul	196.099.245	872.566.961	84.971.370	238.175.034
29	2015	Sleman	643.130.080	984.410.612	57.469.896	426.782.827
30	2015	Kota Yogyakarta	510.548.823	622.365.351	2.342.700	256.395.157
31	2016	Kulon Progo	180.273.364	718.490.508	212.673.879	241.983.753
32	2016	Bantul	404.454.704	999.814.365	99.372.455	284.060.533
33	2016	Gunungkidul	206.278.865	954.997.369	253.996.628	234.690.533
34	2016	Sleman	717.151.176	1.014.310.630	240.745.571	344.002.326
35	2016	Kota Yogyakarta	540.504.300	670.278.830	151.641.280	259.589.340

LAMPIRAN 2

HASIL PERHITUNGAN IBM SPSS *STATISTICS VERSION* 20

A. UJI MULTIKOLINEARITAS

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882[a]	,779	,757	45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226045066970849344,000	3	75348355656949776,000	36,368	,000[b]
	Residual	64226280824714184,000	31	2071815510474651,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-68134988,924	32493839,673		-2,097	,044		
	Pendapatan Asli Daerah	,216	,051	,435	4,206	,000	,669	1,495
	Dana Alokasi Umum	,254	,058	,506	4,379	,000	,534	1,873
	Dana Alokasi Khusus	,178	,149	,116	1,199	,240	,762	1,313

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Correlations

		Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
Pendapatan Asli Daerah	Pearson Correlation	1	,564**	,164
	Sig. (1-tailed)		,000	,173
	N	35	35	35
Dana Alokasi Umum	Pearson Correlation	,564**	1	,472**
	Sig. (1-tailed)	,000		,002
	N	35	35	35
Dana Alokasi Khusus	Pearson Correlation	,164	,472**	1
	Sig. (1-tailed)	,173	,002	
	N	35	35	35

Collinearity Diagnostics[a]

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
1	1	3,451	1,000	,00	,02	,00	,02
	2	,339	3,190	,00	,17	,00	,70
	3	,189	4,274	,11	,57	,01	,12
	4	,021	12,723	,88	,25	,98	,17

a. Dependent Variable: Belanja Modal

B. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882[a]	,779	,757	45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226045066970849344,000	3	75348355656949776,000	36,368	,000[b]
	Residual	64226280824714184,000	31	2071815510474651,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-68134988,924	32493839,673		-2,097	,044
	Pendapatan Asli Daerah	,216	,051	,435	4,206	,000
	Dana Alokasi Umum	,254	,058	,506	4,379	,000
	Dana Alokasi Khusus	,178	,149	,116	1,199	,240

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	54319136,0000	387538080,0000	178900542,4571	81537625,19642	35
Std. Predicted Value	-1,528	2,559	,000	1,000	35
Standard Error of Predicted Value	8515673,000	29428048,000	14633699,990	4826949,172	35
Adjusted Predicted Value	55264644,0000	418805472,0000	179285392,8478	83473079,03759	35
Residual	-75934336,00000	95510248,00000	,00000	43462722,64309	35
Std. Residual	-1,668	2,098	,000	,955	35
Stud. Residual	-1,707	2,315	-,003	1,021	35
Deleted Residual	-79530712,00000	116254928,00000	-384850,39062	49978937,36786	35
Stud. Deleted Residual	-1,765	2,504	,003	1,045	35
Mahal. Distance	,219	13,240	2,914	2,860	35
Cook's Distance	,000	,291	,040	,069	35
Centered Leverage Value	,006	,389	,086	,084	35

a. Dependent Variable: Belanja Modal

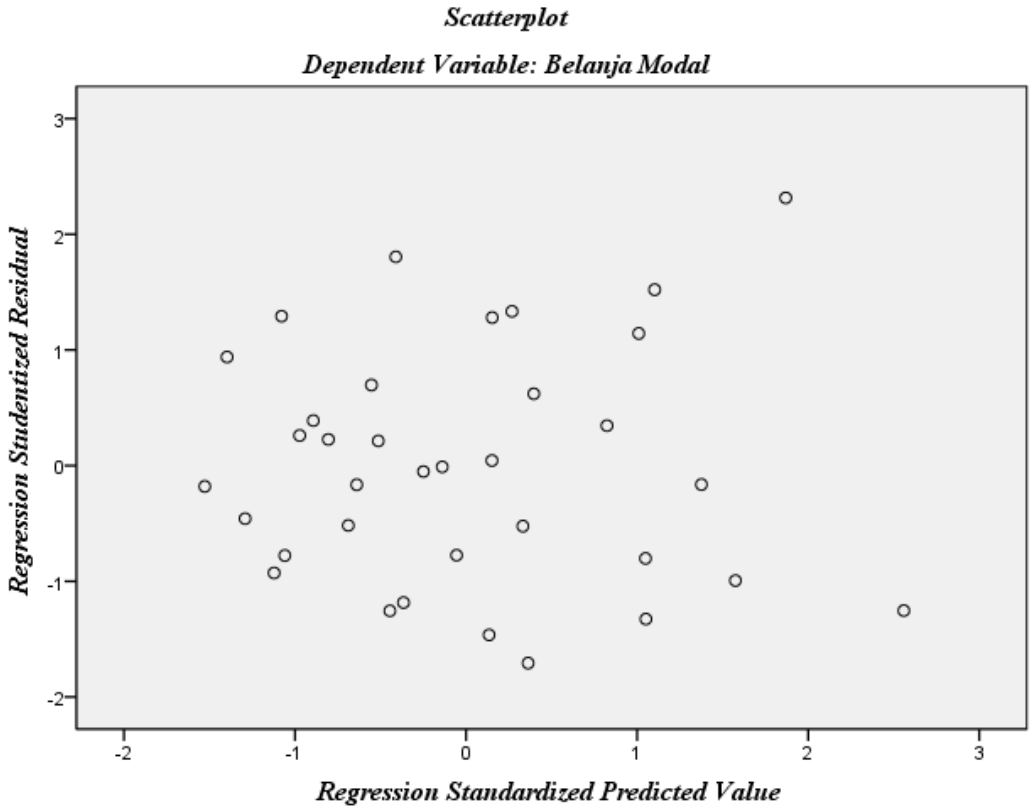

Correlations

			Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pendapatan Asli Daerah	Correlation Coefficient	1,000	,573**	,003	-,092
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,986	,601
		N	35	35	35	35
	Dana Alokasi Umum	Correlation Coefficient	,573**	1,000	,542**	-,032
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,001	,857
		N	35	35	35	35
	Dana Alokasi Khusus	Correlation Coefficient	,003	,542**	1,000	,154
		Sig. (2-tailed)	,986	,001	.	,378
		N	35	35	35	35
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,092	-,032	,154	1,000
		Sig. (2-tailed)	,601	,857	,378	.
		N	35	35	35	35

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Lnx3, Lnx1, Lnx2[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Lnei2
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,302[a]	,091	,003	2,36429

a. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx1, Lnx2

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,351	3	5,784	1,035	,391[b]
	Residual	173,286	31	5,590		
	Total	190,637	34			

a. Dependent Variable: Lnei2
b. Predictors: (Constant), Lnx3, Lnx1, Lnx2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,435	37,969		,512	,612
	Lnx1	,535	,779	,182	,687	,497
	Lnx2	-,309	2,620	-,035	-,118	,907
	Lnx3	,600	,489	,306	1,228	,229

a. Dependent Variable: Lnei2

C. UJI AUTOKORELASI

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,882[a]	,779	,757	45517200,16076	1,519

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum
b. Dependent Variable: Belanja Modal

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226045066970849344,000	3	75348355656949776,000	36,368	,000[b]
	Residual	64226280824714184,000	31	2071815510474651,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-68134988,924	32493839,673		-2,097	,044
	Pendapatan Asli Daerah	,216	,051	,435	4,206	,000
	Dana Alokasi Umum	,254	,058	,506	4,379	,000
	Dana Alokasi Khusus	,178	,149	,116	1,199	,240

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	54319136,0000	387538080,0000	178900542,4571	81537625,19642	35
Residual	-75934336,00000	95510248,00000	,00000	43462722,64309	35
Std. Predicted Value	-1,528	2,559	,000	1,000	35
Std. Residual	-1,668	2,098	,000	,955	35

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	-2190174,94894
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	20
Z	,348
Asymp. Sig. (2-tailed)	,728

a. Median

D. ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pendapatan Asli Daerah[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,739[a]	,546	,532	63183614,87121

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	158529764585174880,000	1	158529764585174880,000	39,710	,000[b]
	Residual	131741583210388640,000	33	3992169188193595,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	83622288,473	18511265,908		4,517	,000
	Pendapatan Asli Daerah	,367	,058	,739	6,302	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Umum[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806[a]	,650	,639	55505005,27093

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	188604762661406912,000	1	188604762661406912,000	61,219	,000[b]
	Residual	101666585134156592,000	33	3080805610125957,500		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-106174150,496	37623211,291		-2,822	,008
	Dana Alokasi Umum	,405	,052	,806	7,824	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Khusus[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,427[a]	,182	,157	84820828,40611

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	52850441056127312,000	1	52850441056127312,000	7,346	,011[b]
	Residual	237420906739436224,000	33	7194572931498067,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	134901677,986	21658597,751		6,229	,000
	Dana Alokasi Khusus	,655	,242	,427	2,710	,011

a. Dependent Variable: Belanja Modal

E. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum[b]	.	Enter

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,882[a]	,779	,757	45517200,16076

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	226045066970849344,000	3	75348355656949776,000	36,368	,000[b]
	Residual	64226280824714184,000	31	2071815510474651,000		
	Total	290271347795563520,000	34			

a. Dependent Variable: Belanja Modal
b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-68134988,924	32493839,673		-2,097	,044
	Pendapatan Asli Daerah	,216	,051	,435	4,206	,000
	Dana Alokasi Umum	,254	,058	,506	4,379	,000
	Dana Alokasi Khusus	,178	,149	,116	1,199	,240

a. Dependent Variable: Belanja Modal

LAMPIRAN 3

SURAT IJIN PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN DARI BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DIY TENTANG LEGALITAS DATA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 2093/UN34.18/LT/2017
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : **Ijin Penelitian**

19 Oktober 2017

Yth . Kepala Badan Pusat Statistik Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Lailatul Mubasiroh
NIM	:	16812147030
Program Studi	:	Akuntansi - S1
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016
Tujuan	:	Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian	:	Kamis - Kamis, 19 Oktober - 30 Nopember 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wakil Dekan I

Prof. Sukirno, S.Pd., M.Si., Ph.D.
NIP. 196904141994031002

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.107/BPS/34563/10/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dra. Riniarti, MM
NIP	:	196608111992122001
Jabatan	:	Kepala Seksi Diseminasi & Layanan Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Lailatul Mubasiroh
Nomor Mahasiswa	:	16812147030
Fakultas/Prodi	:	Ekonomi/Akuntansi S1
Akademi/Universitas	:	Universitas Negeri Yogyakarta

Benar-benar telah mencari data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I.Yogyakarta, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

" PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016 "

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Badan Pusat Statistik
Provinsi D.I.Yogyakarta
Kepala Seksi Diseminasi & Layanan Statistik,

Dra. Riniarti, MM
NIP. 196608111992122001

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan -Bantul Telp.(0274) 4342234 (Hunting) Fax. (0274) 4342230
Email : bps3400@mailhost.bps.go.id; Homepage:http://yogyakarta.bps.go.id

LAMPIRAN 4

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH (KABUPATEN DAN KOTA) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016

TABEL / TABLE 2.13.3 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011**
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Gunung Kidul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**798 248 875**	**843 349 755**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	42 542 031	41 835 405
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	5 948 838	6 978 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	25 079 536	8 656 638
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	4 731 777	4 293 412
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	6 781 880	21 907 355
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	633 692 367	664 710 733
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	34 689 415	31 284 872
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	135 048	1 957 157
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	521 293 704	572 300 004
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	77 574 200	59 168 700
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	122 014 477	136 603 617
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**69 307 651**	**91 349 566**
JUMLAH/*TOTAL*	**867 556 526**	**934 699 321**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 2,13,3 / *TABLE*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Gunung Kidul — Lanjutan/*Continued*

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**620 545 035**	**673 744 383**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	547 852 086	601 385 512
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	51 614	43 500
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	9 245 564	1 709 550
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	19 859 301	23 531 952
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	3 140 003	3 240 323
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	39 839 280	42 484 206
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	557 187	1 349 340
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**144 645 152**	**256 005 311**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	28 519 669	27 984 927
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	69 124 354	84 879 571
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	47 001 129	143 140 813
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**92 366 339**	**4 949 627**
JUMLAH/*TOTAL*	**857 556 526**	**934 699 321**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.3 / TABLE

REAL|SAS| PENER|MAAN PEMER|NTAH KABUPATEN GUNUNG K|DUL, PROV|NS| D| YOGYAKARTA MENURUT JEN|S PENER|MAAN (ribu rupiah), 2011-2012

ACTUAL REVENUES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ *Regency* : Gunung Kidu|

	Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2011	2012 *)
	(1)	(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH** *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**965 826 233**	**1 010 100 099**
1.	Pendapatan As|i Daerah *Original Local Government Revenues*	54 462 419	55 600 362
1.1.	Pajak Daerah *Local Taxes*	8 129 852	8 328 000
1.2.	Retribusi Daerah *Local Retributions*	11 384 305	17 231 674
1.3.	Hasi| Perusahaan Mi|k Daerah & Penge|o|aan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	4 259 233	4 760 476
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	30 689 029	25 280 212
2.	Dana Perimbangan *Balanced Budget*	667 004 719	787 156 404
2.1.	Bagi Hasi| Pajak *Tax Share*	33 561 169	28 382 726
2.2.	Bagi Hasi| Bukan Pajak/Sumber Daya A|am *Non Tax Share/Natural Resources*	2 277 834	244 769
2.3.	Dana A|okasi Umum *General Allocation Funds*	572 008 916	687 944 469
2.4.	Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	59 156 800	70 584 420
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	244 359 095	167 343 333
B.	**PEMB|AYAAN DAERAH** *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**91 877 437**	**73 505 853**
	JUMLAH/TOTAL	**1 057 703 670**	**1 083 605 952**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.3 / TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2012
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**687 031 570**	**747 060 817**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	615 375 146	675 778 408
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	43 354	35 500
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	9 387 373	3 835 785
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	16 454 187	14 627 692
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	3 180 539	3 447 083
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	41 797 142	46 086 349
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	793 829	3 250 000
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**251 818 448**	**328 575 808**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	36 051 916	33 967 723
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	104 745 058	104 299 997
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	111 021 474	190 308 088
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**118 853 652**	**7 969 327**
JUMLAH/TOTAL	**1 057 703 670**	**1 083 605 952**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.3 / TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ *Regency* : Gunung Kidul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 076 591 995**	**1 172 722 552**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	67 050 782	66 710 859
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	10 728 490	9 949 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	19 667 336	22 286 629
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	5 329 405	5 427 611
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	31 325 551	29 047 619
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	799 932 048	879 073 987
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	39 140 931	32 574 795
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	2 262 208	2 146 344
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	687 944 489	779 069 238
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	70 584 420	65 283 610
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	209 519 165	226 937 706
B. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**115 388 455**	**69 386 440**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 191 890 450**	**1 242 108 992**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15.b.3

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF GUNUNG KIDUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ Regency : Gunung Kidul

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**761 024 018**	**850 971 804**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	699 921 656	761 253 893
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	35 197	26 850
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	6 031 450	11 234 176
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	5 718 671	23 489 878
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	3 797 316	3 252 566
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	45 321 431	49 714 441
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	198 297	2 000 000
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**312 134 295**	**385 667 861**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	34 472 698	46 640 795
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	113 300 657	159 684 981
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	164 360 940	179 342 085
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**118 732 137**	**5 469 327**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 191 890 450**	**1 242 108 992**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

10.1 KEUANGAN DAERAH / *LOCAL FINANCE*

Tabel 10.1.1 / ***Table***
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2013–2016
Actual Revenues of Government of Gunungkidul Regency by Source of Revenues (thousand rupiahs), 2013–2016

	Jenis Pendapatan/ *Source of Revenues*	2013	2014
	(1)	(2)	(3)
1.	**Pendapatan Asli Daerah/** ***Original Local Gov.Revenue***	**88 427 668**	**159 306 338**
1.1	Pajak Daerah/*Local Taxes*	12 350 677	28 477 675
1.2	Retribusi Daerah/*Retributions*	25 024 940	25 682 892
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ *Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov.Wealth*	6 815 318	7 939 324
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/*Other Original Local Gov. Revenue*	39 236 514	97 204 447
2.	**Dana Perimbangan/** ***Balanced Budget***	**877 414 789**	**923 974 088**
2.1	Bagi Hasil Pajak/*Tax Sharing*	36 073 196	28 147 376
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/*Non Tax/Natural Resources Sharing*	2 478 297	2 268 274
2.3	DAU[a]/ *General Allocation Funds*	779 069 258	847 388 294
2.4	DAK[as]/ *Special Allocation Funds*	59 793 058	46 172 145
3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah/***Other Legal Revenue*	**381 250 498**	**289 567 870**
3.1	Pendapatan Hibah/ *Grants*	-	-
3.2	Dana Darurat/ *Emergency Funds*	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ *Tax sharing from province and other local gov.*	45 667 980	90 256 970
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah / *Outonomous Region and Balancing Funds*	199 359 040	198 741 258
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ *Financial assistance from province and other local government*	36 223 400	30 569 642
3.6	Lainnya/ *Other Funds*		
	Jumlah/*Total*	**1 342 092 676**	**1 372 848 297**

Sumber/ *Source* : Survei Statistik Keuangan Daerah/*Financial Statistics of Provincial Government Survey*. Keterangan : DAU[a] : Dana Alokasi Umum, DAK[as] : Dana Alokasi Khusus, *Gov* : *government*

https://gunungkidulkab.bps.go.id

Tabel / *Table* 10.1.2 **Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2013–2016**
Actual Expenditures of Government of Gunungkidul Regency by Kind of Expenditures (thousand rupiahs), 2013–2016

Jenis Belanja/ *Kind of Expenditures*		2013	2014
(1)		(2)	(3)
1.	**Belanja Tidak Langsung/** ***Indirect Expenditure***	**819 458 448**	**876 470 620**
1.1	Belanja Pegawai/*Personnel expenditure*	732 809 390	796 259 982
1.2	Belanja Bunga/*Retributions*	26 836	18 577
1.3	Belanja Subsidi/ *Subsidies Expenditure*		
1.4	Belanja Hibah/*Grant*	11 489 842	6 847 920
1.5	Belanja Bantuan Sosial/ *Social Expenditure*	22 909 364	13 212 500
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ *Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government*	8 177 566	5 484 747
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa/ *Financial Assistance Expenditure to Provincial/District/City and VillageGovernment*	49 009 641	52 289 557
1.8	Belanja Tidak Terduga/ *Unpredicted Expenditure*	-	357 337
2.	**Belanja Langsung/ Direct Expenditure**	**960 697 148**	**392 596 887**
2.1	Belanja Pegawai/*Personnel expenditure*	42 742 862	40 542 034
2.2	Belanja Barang dan Jasa/ *Goods and Services Expenditure*	161 581 108	224 765 132
2.3	Belanja Modal/ *Capital expenditure*	156 373 179	127 289 721
	Jumlah/*Total*	**1 380 155 596**	**1 267 067 587**

Sumber/*Source* : Survei Statistik Keuangan Daerah/ *Financial Statistics of Provincial Government Survey*

https://gunungkidulkab.bps.go.id

Lanjutan Tabel/*Continued Tabel* 10.1.2

Jenis Belanja/ *Kind of Expenditures*		2015	2016
(1)		(4)	(5)
1.	**Belanja Tidak Langsung/** *Indirect Expenditure*	**1 061 767 453**	**1 138 660 158**
1 1	Belanja Pegawai/*Personnel expenditure*	867 829 590	912 196 214
1 2	Belanja Bunga/*Retributions*	10 318	1 358
1 3	Belanja Subsidi/ *Subsidies Expenditure*		
1 4	Belanja Hibah/*Grant*	25 951 107	13 884 600
1 5	Belanja Bantuan Sosial/ *Social Expenditure*	7 116 800	-
1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ *Sharing Fund Expenditure to Provincial/District/City and Village Government*	7 950 846	8 824 866
1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa/ *Financial Assistance Expenditure to Provincial/ District/City and VillageGovernment*	152 803 341	203 753 125
1 8	Belanja Tidak Terduga/ *Unpredicted Expenditure*	125 452	-
2	**Belanja Langsung/ *Direct Expenditure***	**524 233 631**	**512 893 422**
2 1	Belanja Pegawai/*Personnel expenditure*	40 151 223	36 842 131
2 2	Belanja Barang dan Jasa/ *Goods and Services Expenditure*	245 907 375	251 360 757
2 3	Belanja Modal/ *Capital expenditure*	238 175 034	234 690 534
	Jumlah/*Total*	**1 586 001 084**	**1 651 553 580**

Sumber/*Source* : Survei Statistik Keuangan Daerah/*Financial Statistics of Provincial Government Survey*

https://gunungsitokab.bps.go.id

TABEL 2,13,4
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**1 095 628 887**	**1 272 583 653**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	163 056 459	170 916 683
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	80 611 543	90 200 165
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	59 110 504	30 068 639
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	10 169 825	11 027 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	13 164 587	39 620 879
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	740 198 028	769 572 791
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	104 361 867	92 604 485
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	2 657 969	2 397 343
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	563 320 892	631 920 663
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	69 847 300	42 650 300
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	192 374 400	332 094 179
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**164 125 627**	**111 413 378**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 259 754 514**	**1 383 997 031**

*) *APBD / Regional bugeted*

https://www.bps.go.id

TABEL 2,13,4 / TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Lanjutan/*Continued*

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG *INDIRECT EXPENDITURES*	**782 307 301**	**909 074 256**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	688 994 947	797 031 957
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	77 980	144 000
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	18 413 622	37 714 827
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	32 161 756	32 667 194
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	19 529 558	19 693 062
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	18 725 347	20 818 935
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	4 404 091	1 004 261
B. BELANJA LANGSUNG *DIRECT EXPENDITURES*	**349 295 098**	**467 784 775**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	66 843 296	91 357 793
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	182 639 533	230 691 105
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	99 812 269	145 735 877
C. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**128 152 115**	**7 138 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 259 754 514**	**1 383 997 031**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.4 / TABLE

REAL|SAS| PENER|MAAN PEMER|NTAH KABUPATEN SLEMAN, PROV|NS| D| YOGYAKARTA MENURUT JEN|S PENER|MAAN (ribu rupiah), 2011-2012

ACTUAL REVENUES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ *Regency* : S|eman

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 311 436 527**	**1 383 011 983**
1. Pendapatan As|i Daerah *Original Local Government Revenues*	226 686 250	220 367 231
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	142 698 407	132 330 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	33 163 698	32 199 504
1.3. Has| Perusahaan Mi|k Daerah & Penge|o|aan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	11 036 188	11 659 155
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	39 787 957	44 178 572
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	753 889 010	917 372 329
2.1. Bagi Has| Pajak *Tax Share*	76 228 592	66 763 236
2.2. Bagi Has| Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	3 089 385	2 662 936
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	631 920 733	795 708 767
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	42 650 300	52 237 390
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	330 861 267	245 272 423
B. PEMB|AYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**111 413 870**	**63 572 430**
JUMLAH/TOTAL	**1 422 850 397**	**1 446 584 413**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15,b,4

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2012
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**883 296 136**	**1 032 856 496**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	776 376 372	897 126 904
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	61 571	144 000
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	36 819 420	29 433 803
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	30 102 115	58 123 541
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	19 693 062	22 498 271
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	19 754 373	21 922 735
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	469 223	3 607 242
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**394 870 545**	**407 089 917**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	84 196 305	76 574 718
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	214 562 841	199 840 724
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	96 111 399	130 674 475
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**144 683 716**	**6 638 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 422 850 397**	**1 446 584 413**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.4
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 589 722 974**	**1 670 168 665**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	301 069 539	298 406 947
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	177 835 870	190 350 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	34 034 970	30 437 957
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	12 783 122	13 855 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	76 415 577	63 763 990
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	946 821 049	992 216 461
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	95 851 409	49 803 219
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	3 023 483	0
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	795 708 767	891 589 912
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	52 237 390	50 823 330
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	341 832 386	379 545 257
B. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**138 694 509**	**82 773 161**
JUMLAH/TOTAL	**1 728 417 483**	**1 752 941 826**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15.b.4

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**994 953 506**	**1 144 812 399**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	888 887 100	992 715 699
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	45 273	144 000
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	15 807 638
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	45 170 865	28 113 486
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	13 974 610	27 941 573
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	23 824 947	33 879 053
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	22 157 039	34 291 400
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	1 193 672	11 919 550
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**426 447 665**	**588 411 427**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	90 666 521	122 974 353
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	203 244 892	263 764 884
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	132 536 252	201 672 190
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**307 016 312**	**19 718 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 728 417 483**	**1 752 941 826**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.4
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2013-2014
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2013-2014

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**1 899 525 637**	**1 869 792 736**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	449 270 306	383 497 912
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	274 628 958	234 300 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	48 001 678	32 537 958
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	15 551 529	18 679 733
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	111 088 141	97 980 221
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	992 782 430	1 048 511 114
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	46 908 099	47 735 402
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	3 461 089	0
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	891 589 912	952 102 502
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	50 823 330	48 673 210
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	457 472 901	437 783 710
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**289 079 875**	**109 019 891**
JUMLAH/*TOTAL*	**2 188 605 512**	**1 978 812 627**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.4 / ***TABLE***

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2014

ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2013-2014

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**1 060 168 200**	**1 209 959 643**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	909 252 019	1 051 282 076
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	28 751	144 000
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	19 518 562	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	43 239 057	24 501 796
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	21 801 063	39 944 377
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	33 388 158	34 947 553
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	32 962 590	41 167 900
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	0	17 971 941
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**633 360 097**	**768 714 984**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	125 003 792	125 875 394
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	301 496 439	331 560 834
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	206 859 866	311 278 756
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**495 077 215**	**138 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**2 188 605 512**	**1 978 812 627**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.4 / TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Penerimaan *Revenues items*	2014**)	2015 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**2 126 563 210**	**2 262 230 418**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	577 380 071	577 585 009
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	352 939 612	348 000 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	61 689 393	41 145 280
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	19 986 059	34 169 551
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	142 765 007	153 270 178
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	1 049 109 194	1 101 084 018
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	45 012 275	49 762 536
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	3 321 207	5 693 954
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	952 102 502	994 410 612
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	48 673 210	61 216 916
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	500 073 945	583 561 391
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**380 744 879**	**534 724 665**
JUMLAH/TOTAL	**2 507 308 089**	**2 796 955 083**

*) *APBD / Regional budget*
**) *Angka Estimasi*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15.b.4 **REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2015**
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURE ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Pengeluaran *Expenditures Items*	2014**)	2015 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG *INDIRECT EXPENDITURES*	**1 120 498 641**	**1 533 934 300**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	960 994 351	1 211 671 937
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	30 387	1 800 000
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	20 629 295	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	45 699 640	53 179 657
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	23 041 685	42 208 269
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	35 264 699	46 858 578
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	34 838 374	139 250 082
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	0	39 467 777
B. BELANJA LANGSUNG *DIRECT EXPENDITURES*	**812 858 968**	**1 236 748 431**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	160 430 778	176 067 606
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	386 942 729	520 520 553
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	265 485 461	540 160 272
C. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**573 950 471**	**26 272 352**
JUMLAH/TOTAL	**2 507 308 080**	**2 796 955 083**

*) *APBD / Regional budget*
**) *Angka Estimasi*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.4 / TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**2 294 622 765**	**2 356 293 841**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	643 130 080	614 410 594
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	373 137 768	367 200 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	45 086 332	42 383 975
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	34 330 599	36 647 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	190 575 381	168 179 619
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	1 080 162 445	1 519 169 465
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	37 574 825	60 742 305
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	707 112	1 090 812
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	984 410 612	1 014 310 630
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	57 469 896	443 025 718
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	571 330 240	222 713 782
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**530 486 040**	**154 476 387**
JUMLAH/TOTAL	***2 825 108 805***	***2 510 770 228***

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.4
TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF SLEMAN, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURE ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ *Regency* : Sleman

Jenis Pengeluaran *Expenditure items*	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**1 298 797 515**	**1 424 237 048**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	1 033 804 729	1 127 683 121
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	258 765	4 106 424
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	50 913 756	43 620 364
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	38 703 752	29 939 898
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	41 101 803	41 128 397
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	133 725 021	172 681 974
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	289 689	5 076 870
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**1 029 954 495**	**1 074 533 180**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	163 717 706	163 421 284
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	439 453 872	562 908 883
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	426 782 827	348 203 013
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**496 356 885**	**12 000 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**2 825 108 895**	**2 510 770 228**

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

Tabel 9.1.1 **Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Sleman, 2016**
***Table** Local Government Revenues by Type of Acceptance in Sleman Regency, 2016*

Jenis Penerimaan *Kind of Income*	Jumlah/*Total* (Rp.)
(1)	(2)
1. Pendapatan Asli Daerah/*Actual Revenue*	**717 151 176 028,57**
a. Pajak Daerah/*Taxes*	407 675 230 792,56
b. Retribusi Daerah/*Receipt for Service*	43 217 124 390,15
c. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	42 031 674 753,95
d. Lain-lain Pendapatan/*Other Receipt*	224 227 146 091,91
2. Dana Perimbangan/*Balancing Fund*	**1 384 675 221 762,00**
a. Bagi Hasil Pajak & Non Pajak/*Taxes Share & Non Taxes*	66 604 303 616,00
b. Dana Alokasi Umum/*General Allocation Fund*	1 014 310 630 000,00
c. Dana Alokasi Khusus/*Special Allocation Fund*	240 745 571 146,00
d. Alokasi dana desa dari APBN	63 014 717 000,00
3. Lain- lain pendapatan yang sah/*Other legitimate Income*	227 221 058 716,23
a. Pendapatan hibah / *Grant Income*	8 947 518 750,00
b. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya / *Profit's Portion of Tax from Other Local Government*	205 041 339 460,23
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi & Pemda Lainnya / *Province Government Sharing*	8 282 200 000,00
d. Dana Insentif Daerah / *Regional Incentive Fund*	
e. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat/ *Central Government Sharing*	
f. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5 000 000 000,00
g. Pendapatan lainnya	
Jumlah/Total	**2 329 097 456 000,80**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Source : The Agency of Regional Asset

http://slemankab.bps.go.id

TABEL 2,13,2 / TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL REVENUES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**986 866 901**	**900 867 639**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	81 637 099	106 885 124
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	16 541 250	28 752 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	15 978 422	21 452 288
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	7 424 932	7 546 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	41 692 495	49 134 825
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	688 676 567	707 595 997
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	50 844 583	32 646 561
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	3 754 137	3 674 036
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	573 512 337	625 350 000
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	60 565 500	45 925 400
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	216 553 235	86 386 518
B. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**61 043 923**	**16 336 945**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 047 910 824**	**917 204 584**

*) *APBD / Regional bugeted*

https://www.bps.go.id

TABEL 2,13,2 / *TABLE*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SELURUH PROVINSI D. I. YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2010-2011
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT THROUGHOUT D. I. YOGYAKARTA BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2010-2011

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Lanjutan/*Continued*

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2010	2011 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**725 484 516**	**670 158 257**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	640 523 590	595 336 223
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	65 235	120 145
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	17 408 154	10 655 000
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	32 612 762	33 345 375
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	1 776 309	2 006 742
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	29 751 529	27 294 789
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	3 346 937	1 499 983
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**286 872 331**	**238 231 096**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	50 880 694	49 275 021
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	112 742 357	98 024 088
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	123 249 280	90 931 987
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**35 553 977**	**8 815 231**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 047 910 824**	**917 204 584**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.2
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2011-2012
ACTUAL REVENUES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY REVENUES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ Regency : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues items*	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**1 180 547 112**	**1 195 345 041**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	128 896 456	121 593 862
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	35 068 592	32 090 347
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	17 798 604	21 512 622
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	7 290 930	7 753 664
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	68 738 330	60 237 229
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	717 123 250	868 175 052
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	41 841 739	32 646 561
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	4 301 484	4 212 467
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	625 060 827	768 034 584
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	45 919 200	63 281 460
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	334 527 406	205 576 127
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**35 107 747**	**16 900 836**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 215 654 859**	**1 212 245 877**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15,b,2 / *TABLE*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2011-2012
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2011-2012

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2011	2012 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**817 126 902**	**880 309 449**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	723 599 430	802 223 164
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	51 507	120 145
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	23 888 752	19 704 362
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	36 168 122	9 278 060
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	1 906 275	1 949 183
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	30 446 501	43 475 171
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	1 066 315	3 559 354
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**334 759 050**	**317 721 197**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	63 518 010	61 263 526
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	151 824 010	129 364 033
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	119 417 030	127 093 638
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**63 768 907**	**14 215 231**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 215 654 859**	**1 212 245 877**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.2
TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 337 570 725**	**1 337 731 871**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	166 897 778	170 006 171
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	51 768 352	59 042 000
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	20 595 099	24 586 237
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	8 184 263	9 015 869
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	86 050 064	77 362 065
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	885 352 411	923 582 867
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	49 864 791	18 746 561
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	4 171 586	2 828 792
2.3. Dana Alokasi Umum *General Allocation Funds*	768 034 584	854 810 634
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Allocation Funds*	63 281 450	47 196 880
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	285 620 536	244 142 833
B. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**62 686 563**	**42 620 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 400 257 288**	**1 380 351 871**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.2 / TABLE

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2012-2013
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2012-2013

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2012	2013 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**885 971 127**	**920 524 996**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	818 671 802	816 967 660
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	37 873	51 507
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	14 952 495	28 468 250
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	6 895 326	24 651 500
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	1 949 183	1 949 183
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	43 254 230	39 335 671
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	210 218	9 101 325
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**396 907 256**	**434 649 644**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	75 488 327	84 868 329
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	181 312 176	202 986 346
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	140 106 753	146 796 969
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**117 378 905**	**25 177 231**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 400 257 288**	**1 380 351 871**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.2 / *TABLE*

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2013-2014
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEMS (thousand rupiahs), 2013-2014

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT REVENUES*	**1 520 302 696**	**1 687 985 458**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	224 197 864	265 128 265
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	83 232 018	70 946 200
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	27 116 286	20 725 749
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	9 508 076	9 809 856
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	104 341 484	163 646 460
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	938 492 078	1 042 469 209
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	31 655 243	27 747 349
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	4 829 321	4 555 302
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	854 810 634	949 252 188
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	47 196 880	60 914 370
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	357 612 754	380 387 984
B. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**110 873 724**	**88 690 880**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 631 176 420**	**1 776 676 338**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.2 / *TABLE*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2013-2014
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURES ITEMS (thousand rupiahs), 2013-2014

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Pengeluaran *Expenditures Items*	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**916 215 913**	**1 035 223 417**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	852 127 418	955 321 213
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	24 052	10 500
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	14 007 445	5 952 744
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	15 778 200	11 583 475
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	34 103 008	55 239 725
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	175 790	7 115 760
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**471 503 258**	**699 103 690**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	94 968 988	123 625 083
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	193 264 430	285 590 848
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	183 269 840	289 887 759
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**243 457 249**	**42 349 231**
JUMLAH/*TOTAL*	**1 631 176 420**	**1 776 676 338**

*) *APBD / Regional bugeted*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.a.2 / TABLE

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*		2014	2015 *)
(1)		(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH** ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 813 917 143**	**1 857 098 631**
1.	Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	357 411 064	312 419 914
1.1.	Pajak Daerah *Local Taxes*	99 558 471	85 000 100
1.2.	Retribusi Daerah *Local Retributions*	26 004 714	26 774 227
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	12 643 382	16 049 618
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	219 204 497	184 596 969
2.	Dana Perimbangan *Balanced Budget*	1 036 632 898	1 037 859 455
2.1.	Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	21 545 802	28 819 599
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	4 920 538	5 086 159
2.3.	Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	949 252 198	942 850 827
2.4.	Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	60 914 370	61 102 870
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	419 873 181	506 819 262
B.	**PEMBIAYAAN DAERAH** ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**213 163 271**	**148 713 261**
	JUMLAH/TOTAL	**2 027 080 414**	**2 005 811 892**

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

TABEL 15.b.2 / *TABLE*

REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2014-2015
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURE ITEM (thousand rupiahs), 2014-2015

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Pengeluaran *Expenditures items*	2014	2015 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG *INDIRECT EXPENDITURES*	**978 483 339**	**1 239 821 812**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	908 310 595	1 043 905 676
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	10 327	0
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	7 870 786	26 331 000
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	11 729 150	19 391 950
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	0	11 177 433
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	50 215 239	134 931 465
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	347 262	4 084 288
B. BELANJA LANGSUNG *DIRECT EXPENDITURES*	**721 867 949**	**739 299 080**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	107 521 636	53 795 712
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	303 931 013	392 007 276
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	310 415 291	293 496 092
C. PEMBIAYAAN DAERAH *LOCAL GOVERNMENT FINANCING*	**326 729 135**	**26 691 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**2 027 080 414**	**2 005 811 892**

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15.a.2 **REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENERIMAAN** (ribu rupiah), 2015-2016
***ACTUAL RECEIPT OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY RECEIPT ITEM** (thousand rupiahs), 2015-2016*

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Penerimaan *Revenues Items*	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT REVENUES***	**1 951 223 237**	**2 077 645 142**
1. Pendapatan Asli Daerah *Original Local Government Revenues*	380 624 492	349 492 790
1.1. Pajak Daerah *Local Taxes*	123 257 184	104 668 270
1.2. Retribusi Daerah *Local Retributions*	22 840 343	21 918 542
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth*	16 379 740	19 314 676
1.4. Lain-lain PAD yang Sah *Other Original Local Gov. Revenues*	226 147 225	203 591 302
2. Dana Perimbangan *Balanced Budget*	1 041 842 461	1 152 588 359
2.1. Bagi Hasil Pajak *Tax Share*	20 825 979	28 819 599
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam *Non Tax Share/Natural Resources*	5 805 995	4 517 335
2.3. Dana Alokasi Umum *General Alocation Funds*	942 850 827	999 814 365
2.4. Dana Alokasi Khusus *Special Alocation Funds*	72 359 660	119 437 060
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah *Other Legal Revenues*	518 756 284	575 563 993
B. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**298 601 810**	**169 729 492**
JUMLAH/TOTAL	**2 249 825 047**	**2 247 374 634**

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

TABEL / TABLE 15.b.2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DI YOGYAKARTA MENURUT JENIS PENGELUARAN (ribu rupiah), 2015-2016
ACTUAL EXPENDITURES OF REGENCY GOVERNMENT OF BANTUL, DI YOGYAKARTA PROVINCE BY EXPENDITURE ITEM (thousand rupiahs), 2015-2016

Kabupaten/ *Regency* : Bantul

Jenis Pengeluaran *Expenditures Items*	2015	2016 *)
(1)	(2)	(3)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG ***INDIRECT EXPENDITURES***	**1 178 889 690**	**1 360 241 955**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	968 253 480	1 117 661 233
2. Belanja Bunga *Interest Expenditures*	0	0
3. Belanja Subsidi *Subsidies Expenditures*	0	0
4. Belanja Hibah *Grant Expenditures*	43 433 692	13 035 930
5. Belanja Bantuan Sosial *Social Aids Expenditures*	17 453 300	5 508 550
6. Belanja Bagi Hasil *Sharing fund Expenditures*	11 177 423	12 664 759
7. Belanja Bantuan Keuangan *Financial Aids Expenditures*	137 956 724	195 731 577
8. Pengeluaran Tidak Terduga *Unpredicted Expenditures*	616 071	15 639 906
B. BELANJA LANGSUNG ***DIRECT EXPENDITURES***	**754 412 885**	**863 422 679**
1. Belanja Pegawai *Personnel Expenditures*	48 401 697	55 856 376
2. Belanja Barang dan Jasa *Goods and Services Expenditures*	371 130 713	468 612 655
3. Belanja Modal *Capital Expenditures*	334 880 395	338 953 648
C. PEMBIAYAAN DAERAH ***LOCAL GOVERNMENT FINANCING***	**316 522 552**	**23 710 000**
JUMLAH/*TOTAL*	**2 249 825 647**	**2 247 374 634**

*) *APBD / Regional budget*

http://www.bps.go.id

9.1. KEUANGAN DAERAH
REGIONAL FINANCE

Tabel / Table : 9.1.1

Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Bantul (rupiah), 2015-2016
Realization of Income of Regional Finance at Bantul Regency, 2015-2016 (Rp)

Jenis Penerimaan / *Type of Income*	2015	2016
(1)	(2)	(3)
A PENDAPATAN / *INCOME*	**1.851.223.236.708**	**2.080.334.166.354**
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) / *Actual Regional Balance*	**390,624,482,073**	**434,454,703,746**
a. Hasil Pajak Daerah / *Regional Taxes*	123,267,183,735	133,474,742,165
b. Hasil Retribusi Daerah / *Receipt for Service*	22.840.342.141	26.613.085.434
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / *Regional Manufacture Interest*	18,379,740,300	21,068,269,986
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah/ *Others Actual Regional Balance*	226,147,225,897	223,298,606,161
2. Dana Perimbangan / *Balancing Fund*	**1,041,842,461,074**	**1,331,352,777,163**
a. Bagi Hasil Pajak/ *Profit's Portion of Tax Receipts*	20,825,979,100	34,632,858,847
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/ *Profit's Portion of Non Tax Receipts*	5,805,994,974	4,705,557,041
c. Dana Alokasi Umum / *General Allocation Fund*	942,850,827,000	998,814,365,000
d. Dana Alokasi Khusus / *Special Allocation Fund*	72,359,660,000	98,372,454,939
e. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) / *Special Allocation Fund (non physical)*		192,827,541,336
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah / *Others Revenues*	**518,756,293,558**	**284,526,685,445**
a. Pendapatan Hibah/	5,174,586,400	6,148,735,500
b. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/	127,655,949,158	137,137,204,945
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus /	354,195,046,000	137,137,204,945
d. Dana Darurat		
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	31,730,700,000	21,327,600,000
f. Dana Tunjangan Keperdidikan		

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Source : *The Government of Bantul Regency*

Lanjutan Tabel / *Continued Table* : 9.1.1

Uraian / *Description*	2015	2016
(1)	(5)	(6)
B BELANJA / *EXPENDITURE*	1,833,302,495,457	2,016,543,978,974
1. Belanja Tidak Langsung/*Indirect Expenditure*	1,178,889,689,579	1,265,890,290,230
a. Belanja Pegawai/ *Personnel Expenditures*	968,253,479,955	1,032,505,302,997
b. Belanja Bunga/ *Profit Expenditures*		
b. Belanja Hibah/ *Grant Expenditures*	43,433,691,844	31,662,069,500
c. Belanja Bantuan Sosial/ *Social Assistance Grants Expenditures*	17,453,300,000	3,267,350,000
d. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/ *Profit's Portion Expenditures for Province/Regency/City/ Village Government*	11,177,422,633	12,429,895,580
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota / *Financial Assistance Grants Expenditures for Province/Regency/City/Village Gov*	137,855,724,509	185,304,699,853
f. Belanja Tidak Terduga/*Unexpected Expenditures*	616,070,638	520,872,300
2. Belanja Langsung/*Direct Expenditures*	763,311,235,528	750,653,688,744
a. Belanja Pegawai/ *Personnel Expenditures*	48,401,698,955	44,678,753,435
b. Belanja Barang dan Jasa/ *Material and Services Expenditures*	371,130,713,662	421,086,369,647
c. Belanja Modal/*Capital Expenditures*	334,880,395,261	284,060,532,662

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Source : *The Government of Bantul Regency*

http://bantulkab.bps.go.id

Lanjutan Tabel / Continued Table : 9.1.1

Uraian / Description	2015	2016
(1)	(5)	(6)
C. PEMBIAYAAN DAERAH (NETTO)/ *REGIONAL FUNDING (NETTO)*	265,105,309,910	268,326,441,728
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah/ *Financial Receipts*	298,601,809,810	293,078,441,728
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya/ *Surplus/Deficit from the Previous Year's Budget*	283,419,682,599	283,026,051,158
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah/ *Financial Expenditures*	33,496,500,000	24,752,000,000
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah/ *Investment of Local Government*	25,800,000,000	16,045,000,000
b. Pembayaran Pokok Utang/*Main Credit Payment*		
c. Pemberian Pinjaman Daerah/ *Local Loan*	-	
d. Dana Bergulir/ *Revolving Fund*	7,696,500,000	8,707,000,000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)/ *Surplus/Deficit Budget*	283,026,051,158	282,116,628,106

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Source : The Government of Bantul Regency

http://bantulkab.bps.go.id

KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
Audited

URAIAN	Ca/LK	Anggaran TA 2010 (Rp)		Realisasi TA 2010 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2009 (Rp)
PENDAPATAN	511	992.649.725.261,43		926.866.902.363,07		93,42	882.149.788.429,75
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.	89.015.027.964,59	8,97%	81.637.099.293,07	8,27%	91,71	88.691.362.690,38
Pajak Daerah	1.a)	16.679.578.000,00		16.541.249.955,00		99,17	14.108.451.478,99
Retribusi Daerah	1.b)	14.714.156.244,00		15.978.422.097,00		108,59	58.205.951.445,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.c)	7.424.770.204,59		7.424.932.057,58		100,00	7.512.838.194,82
Lain-lain PAD	1.f)	50.196.523.516,00		41.692.495.183,49		83,06	8.864.121.571,57
PENDAPATAN TRANSFER	2	867.919.586.296,84	87,43%	869.664.692.070,00	88,13%	100,20	755.798.547.739,37
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.a)	681.317.264.969,00		688.676.566.702,00		101,08	668.488.989.539,37
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a) 1)	43.703.881.544,00		50.844.592.694,00		116,34	44.254.423.902,37
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	2.a) 2)	3.535.546.425,00		3.754.137.008,00		106,18	97.422.637,00
Dana Alokasi Umum	2.a) 3)	573.512.337.000,00		573.512.337.000,00		100,00	568.502.143.000,00
Dana Alokasi Khusus	2.a) 4)	60.565.500.000,00		60.565.500.000,00		100,00	55.635.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	2.b)	144.040.697.600,00	5,86	138.429.422.694,00		96,10	48.172.499.300,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	2.b) 1)	52.728.685.000,00		49.921.385.094,00		94,68	48.172.499.300,00
Dana Tunjangan Pendidikan	2.b) 2)	91.320.012.600,00		88.508.037.600,00		96,92	
Transfer Pemerintah Propinsi	2.c)	42.553.623.727,84		42.558.702.674,00		100,01	39.137.058.900,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c) 1)	42.553.623.727,84		42.558.702.674,00		100,01	39.137.058.900,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3	35.715.111.000,00	3,60%	35.565.111.000,00	3,80%	99,58	37.659.878.000,00
Pendapatan Hibah	3.a)	17.169.480.000,00		17.169.480.000,00		100,00	68.100.000,00
Pendapatan Dana Darurat	3.b)	0,00		0,00		-	0,00
Pendapatan Lainnya	3.c)	18.545.631.000,00		18.395.631.000,00		99,19	37.591.778.000,00
BELANJA	512	1.053.247.416.871,00		1.012.356.047.235,49		96,12	903.767.000.429,01
BELANJA OPERASI	1	906.787.557.047,82	86,09%	883.984.320.634,49	87,32%	97,49	792.019.021.918,01
Belanja Pegawai	1.a)	702.570.372.064,00		689.623.154.403,00		98,19	560.830.196.490,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	122.770.033.533,82		114.323.466.938,00		93,12	118.719.979.086,00
Belanja Bunga	1.c)	120.145.200,00		65.234.566,49		54,30	78.962.221,01
Belanja Subsidi	1.d)	0,00		0,00			0,00
Belanja Hibah	1.e)	18.002.523.348,00		17.408.153.945,00		96,70	29.718.902.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	33.274.662.202,00		32.612.761.782,00		98,01	57.854.122.121,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	30.049.820.700,00		29.751.529.000,00		99,01	24.816.860.000,00
BELANJA MODAL	2	140.422.405.247,00	13,33%	123.249.280.474,00	12,17%	87,77	107.353.190.571,00
Belanja Tanah	2.a)	127.200.000,00		91.053.000,00		71,58	1.265.320.800,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	19.997.032.513,00		16.752.448.584,00		83,77	16.897.162.231,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	46.682.846.994,00		43.814.861.675,00		93,86	43.274.719.225,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	45.096.051.240,00		44.570.678.675,00		98,84	44.001.821.635,00
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	28.520.274.500,00		18.020.238.340,00		63,18	1.914.166.680,00
Belanja Aset lainnya	2.f)	0,00		0,00			0,00
BELANJA TAK TERDUGA	3	4.261.145.248,34	0,40%	3.346.936.800,00	0,33%	78,55	431.958.640,00
Belanja Tak terduga		4.261.145.248,34		3.346.936.800,00		78,55	431.958.640,00
TRANSFER KE KAB/KOT/DESA	4	1.776.309.327,84		1.776.309.327,00		100,00	3.962.829.300,00
Bagi Hasil Pajak	4.a)	1.215.956.547,84	68,45%	1.215.956.547,00	68,45%	100,00	3.361.925.800,00
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	560.352.780,00	31,55%	560.352.780,00	31,55%	100,00	600.903.500,00
Surplus Defisit		(60.597.691.609,57)		(25.489.944.872,42)			(21.617.211.999,26)
Pembiayaan	513						
PENERIMAAN DAERAH	1	61.043.922.609,57		61.043.922.609,57		100,00	84.776.365.285,09
Penggunaan SILPA		61.043.922.609,57		61.043.922.609,57		100,00	84.776.365.285,09
Pencairan dana Cadangan		0,00		0,00			0,00
Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan		0,00		0,00			0,00
Penerimaan Pinjaman daerah		0,00		0,00			0,00
Penerimaan pemberian Pinjaman		0,00		0,00			0,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00		0,00			0,00

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2010 (Rp)		Realisasi TA 2010 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2009 (Rp)
PENGELUARAN DAERAH	2	446.231.000,00	0,69	446.230.676,26		100,00	2.115.230.676,26
Pembentukan Dana Cadangan		0,00		0,00			0,00
Penyertaan (Investasi) Pemda	2.a)	281.000.000,00	82,97%	281.000.000,00		100,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.b)	115.231.000,00	33,83%	115.230.676,26		100,00	115.230.676,26
Pemberian Pinjaman	2.c)	50.000.000,00		50.000.000,00			0,00
Pembiayaan Netto		60.597.691.609,57		60.597.691.933,31		100,00	82.661.134.608,83
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00		35.107.747.060,89			61.043.922.609,57

Bantul, Mei 2011
Bupati Bantul

Sri Suryawidati

KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Audited

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2011 (Rp)		Realisasi TA 2011 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2010 (Rp)
PENDAPATAN	511	1,165,047,981,158.75		1,180,547,112,432.41		101.33	886,876,642,363.07
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1	115,321,898,743.75	9.90%	128,896,456,173.41	10.92%	111.77	81,637,099,293.07
Pajak Daerah	1.a)	30,802,000,000.00		35,068,581,776.50		113.85	16,541,249,955.00
Retribusi Daerah	1.b)	18,781,093,180.00		17,798,603,458.00		94.77	15,978,422,097.00
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah	1.c)	7,380,833,563.75		7,290,930,563.75		98.78	7,424,932,057.58
Lain-lain PAD	1.d)	58,337,875,000.00		68,738,330,385.16		117.84	41,692,495,183.49
PENDAPATAN TRANSFER	2	1,006,882,376,415.00	86.43%	1,014,001,920,259.00	85.89%	100.71	869,664,692,070.00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P	2.a)	710,058,724,015.00		717,123,249,859.00		101.00	688,676,568,702.00
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a) 1)			41,841,739,122.00			50,844,592,694.00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	2.a) 2)	38,781,324,015.00		4,301,483,737.00		11.09	3,754,137,008.00
Dana Alokasi Umum	2.a) 3)	625,350,000,000.00		625,060,827,000.00		99.95	573,512,337,000.00
Dana Alokasi Khusus	2.a) 4)	45,825,400,000.00		45,919,200,000.00		99.80	60,565,500,000.00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	2.b)	243,682,126,400.00		243,734,530,400.00		100.02	138,429,422,694.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khus	2.b) 1)	102,278,237,000.00		102,330,641,000.00			49,921,365,094.00
Dana Tunjangan Pendidikan	2.b) 2)	141,403,889,400.00		141,403,889,400.00			
lainnya							88,508,037,600.00
Transfer Pemerintah Propinsi	2.c)	53,123,526,000.00		53,144,140,000.00		100.04	42,558,702,674.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c) 1)	53,123,526,000.00		53,144,140,000.00		100.04	42,558,702,674.00
LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAI	3	42,862,786,000.00	3.68%	37,648,736,000.00	3.19%	87.84	35,565,111,000.00
Pendapatan Hibah	3.a)	21,930,700,000.00					17,169,480,000.00
Pendapatan Dana Darurat	3.b)						
Pendapatan Lainnya	3.c)	20,932,086,000.00		37,648,736,000.00		179.85	18,395,631,000.00
BELANJA	512	1,191,039,577,219.64		1,151,685,952,327.97		96.71	1,012,382,283,723.49
BELANJA OPERASI	1	1,046,672,168,341.00	87.88%	1,029,496,332,157.97	89.37%	98.36	883,984,320,634.49
Belanja Pegawai	1.a)	795,761,354,461.00		787,117,440,099.00		98.91	689,823,154,403.00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	157,624,633,260.00		151,824,010,095.00		96.32	114,323,486,938.00
Belanja Bunga	1.c)	120,145,200.00		51,506,911.97		42.87	65,234,566.49
Belanja Subsidi	1.d)						
Belanja Hibah	1.e)	24,086,453,000.00		23,888,751,500.00		99.18	17,408,153,945.00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	38,269,953,900.00		36,168,122,552.00		94.51	32,612,761,782.00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	30,809,628,500.00		30,446,501,000.00		98.82	29,751,529,000.00
BELANJA MODAL	2	138,796,238,781.00	11.65%	119,417,030,209.00	10.37%	86.04	123,249,280,474.00
Belanja Tanah	2.a)	2,805,300,000.00		2,357,268,100.00		84.03	91,053,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	18,943,640,046.00		14,707,473,947.00		77.64	16,752,448,584.00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	48,574,885,125.00		47,812,118,020.00		98.43	43,814,861,875.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	50,914,202,450.00		50,334,892,090.00		98.86	44,570,678,675.00
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	17,558,211,160.00		4,205,278,052.00		23.95	18,020,238,340.00
Belanja Aset lainnya	2.f)						
BELANJA TAK TERDUGA	3	3,661,395,497.64	0.31%	1,066,315,361.00	0.09%	29.12	3,346,936,800.00
Belanja Tak terduga		3,661,395,497.64		1,066,315,361.00		29.12	3,346,936,800.00
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA	4	1,909,774,600.00	0.16%	1,906,274,600.00	0.17%	99.82	1,776,309,327.00
Bagi Hasil Pajak	4.a)	1,214,929,600.00	63.62%	1,214,929,600.00	63.73%	100.00	1,215,956,547.00
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	694,845,000.00	36.38%	691,345,000.00	36.27%	99.50	560,352,780.00

URAIAN	Gol K	Anggaran TA 2011 (Rp)		Realisasi TA 2011 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2010 (Rp)
Surplus Defisit		(25,992,516,060.89)		28,661,160,104.44			(25,489,944,872.42)
Pembiayaan	6 1 3						
PENERIMAAN DAERAH	1	35,107,747,060.89		35,107,747,060.89		100.00	61,043,922,609.57
Penggunaan SILPA		35,107,747,060.89		35,107,747,060.89		100.00	61,043,922,609.57
Pencairan dana Cadangan							-
Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan							-
Penerimaan Pinjaman daerah							-
Penerimaan pemberian Pinjaman							-
Penerimaan Piutang Daerah							-
PENGELUARAN DAERAH	2	9,115,231,000.00		4,115,230,676.26		45.15	446,230,676.26
Pembentukan Dana Cadangan							-
Penyertaan (investasi) Pemda	2 a)	9,000,000,000.00	98.74%	4,000,000,000.00		44.44	281,000,000.00
Pembayaran Pokok Hutang	2 b)	115,231,000.00	1.26%	115,230,676.26		100.00	115,230,676.26
Pemberian Pinjaman	2 c)	-					50,000,000.00
Pembiayaan Netto		25,992,516,060.89		30,992,516,384.63		119.24	60,597,691,933.31
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		0.00		59,653,676,489.07			35,107,747,060.89

Bantul, 2012

Bupati Bantul

Sri Surya Widati

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2012 DAN 31 Desember 2011
Audited

URAIAN	CaLK	Anggaran Perubahan TA 2012 (Rp)		Realisasi TA 2012 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2011 (Rp)
PENDAPATAN	511	1.302.131.101.144,47		1.337.570.725.382,56		102,72	1.180.547.112.432,41
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.	141.624.239.103,47	10,88%	166.697.778.028,56	12,46%	117,69	128.896.456.173,41
Pajak Daerah	1.a)	39.922.684.800,00		51.768.352.231,50		129,67	35.068.591.776,50
Retribusi Daerah	1.b)	19.821.987.200,00		20.595.098.751,00		103,90	17.798.603.458,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.c)	8.183.669.625,92		8.184.263.102,01		100,01	7.290.930.553,75
Lain-lain PAD	1.d)	73.695.897.477,55		86.050.063.944,05		116,76	68.738.330.385,16
PENDAPATAN TRANSFER	2	1.141.742.834.111,00	87,68%	1.155.535.427.354,00	86,39%	101,21	1.014.001.920.259,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P	2.a)	878.391.333.111,00		885.352.411.354,00		100,79	717.123.249.859,00
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a) 1)	42.862.842.513,00		49.864.791.011,00			41.841.739.122,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	2.a) 2)	4.212.456.598,00		4.171.586.343,00		99,03	4.301.483.737,00
Dana Alokasi Umum	2.a) 3)	768.034.584.000,00		768.034.584.000,00		100,00	625.060.827.000,00
Dana Alokasi khusus	2.a) 4)	63.281.450.000,00		63.281.450.000,00		100,00	45.919.200.000,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	2.b)	205.719.691.000,00		205.719.691.000,00		100,00	243.734.530.400,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khus	2.b) 1)	0,00		0,00			102.330.641.000,00
Dana Tunjangan Pendidikan	2.b) 2)	205.719.691.000,00		205.719.691.000,00		100,00	141.403.889.400,00
lainnya							
Transfer Pemerintah Propinsi	2.c)	57.631.810.000,00		64.463.325.000,00		111,85	53.144.140.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c) 1)	57.631.810.000,00		64.463.325.000,00		111,85	53.144.140.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAI	3	18.764.027.930,00	0,38%	15.437.520.000,00	1,15%	82,27	37.648.736.000,00
Pendapatan Hibah	3.a)	5.000.000.000,00		-		#DIV/0!	-
Pendapatan Dana Darurat	3.b)	0,00					
Pendapatan Lainnya	3.c)	13.764.027.930,00		15.437.520.000,00		112,16	37.648.736.000,00
BELANJA	512	1.345.680.130.604,54		1.282.878.383.296,48	V	95,33	1.151.885.952.327,97
BELANJA OPERASI	1	1.186.871.734.104,00	77,83%	1.140.612.229.886,48	85,91%	96,10	1.029.496.332.157,97
Belanja Pegawai	1.a)	923.704.372.756,00		894.160.129.295,00		96,80	787.117.440.099,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	193.203.033.536,00		181.312.175.634,00		93,85	151.824.010.095,00
Belanja Bunga	1.c)	120.145.200,00		37.873.282,48		31,52	51.506.911,97
Belanja Subsidi	1.d)	0,00					
Belanja Hibah	1.e)	15.348.373.200,00		14.952.495.000,00		97,42	23.888.751.500,00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	10.525.137.912,00		6.895.326.112,00		65,51	36.168.122.552,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	43.970.671.500,00		43.254.230.563,00		98,37	30.446.501.000,00
BELANJA MODAL	2	150.021.337.483,00	0,19%	140.106.752.810,00	10,92%	93,39	119.417.030.209,00
Belanja Tanah	2.a)	2.267.000.000,00		1.723.046.790,00		76,01	2.357.268.100,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	32.883.581.238,00		30.384.563.920,00		92,40	14.707.473.947,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	36.714.800.920,00		36.129.061.430,00		98,40	47.812.118.020,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	64.417.189.465,00		63.581.718.620,00		98,70	50.334.892.090,00
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	13.738.765.860,00		8.288.362.050,00		60,33	4.205.278.052,00
Belanja Aset lainnya	2.f)	0,00		-			-
BELANJA TAK TERDUGA	3	6.837.876.417,54	0,58%	210.218.000,00	0,02%	3,07	1.066.315.361,00
Belanja Tak terduga		6.837.876.417,54		210.218.000,00		3,07	1.066.315.361,00
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA	4	1.949.182.600,00	0,10%	1.949.182.600,00	0,15%	100,00	1.906.274.600,00
Bagi Hasil Pajak	4.a)	1.201.463.600,00	62,23%	1.201.463.600,00	61,64%	100,00	1.214.929.600,00
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	747.719.000,00	#REF!	747.719.000,00	38,36%	100,00	691.345.000,00

URAIAN	CaLK	Anggaran Perubahan TA 2012 (Rp)		Realisasi TA 2012 (Rp)		(%)	Realisasi TA 2011 (Rp)
Surplus Defisit		(43.549.029.460,07)		54.692.342.086,08		(125,59)	28.661.160.104,44
Pembiayaan	5.1.3						
PENERIMAAN DAERAH	1	62.216.920.839,07		62.686.662.399,89		100,75	35.107.747.060,89
Penggunaan SiLPA		59.653.676.489,07		59.581.049.143,07		99,88	35.107.747.060,89
Pencairan dana Cadangan		0,00					
Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan		0,00					
Penerimaan Pinjaman daerah		0,00					
Penerimaan pembentukan Pinjaman		0,00					
Penerimaan kembali dana bergulir		2.563.244.350,00		3.105.613.256,82		121,16	
PENGELUARAN DAERAH	2	18.667.891.379,00		13.271.230.676,26		71,09	4.115.230.676,26
Pembentukan Dana Cadangan		0,00					
Penyertaan (investasi) Pemda	2.a)	18.552.660.379,00	#DIV/0!	13.156.000.000,00		70,91	4.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.b)	115.231.000,00	#DIV/0!	115.230.676,26		100,00	115.230.676,26
Pemberian Pinjaman	2.c)						
Pembiayaan Netto		43.549.029.460,07		49.415.331.723,63		113,47	30.992.516.384,63
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00		104.107.673.809,71			59.653.676.489,07

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Audited

	URAIAN	JUMLAH TA 2012		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2	9	10	9	10
A	PENDAPATAN	1.302.131.101.144,47	1.337.570.725.382,56	35.439.624.238,09	2,72
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	141.624.239.103,47	166.597.778.028,56	24.973.538.925,09	17,63
	1 Pajak Daerah	39.922.684.800,00	51.768.352.231,50	11.845.667.431,50	29,67
	2 Retribusi Daerah	19.821.987.200,00	20.595.098.751,00	773.111.551,00	3,90
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.183.669.625,92	8.184.263.102,01	593.476,09	-
	4 Lain-Lain PAD	73.695.897.477,55	86.050.063.944,05	12.354.166.466,50	16,76
	DANA PERIMBANGAN	878.391.333.111,00	885.352.411.354,00	6.961.078.243,00	0,79
	1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	47.075.299.111,00	54.036.377.354,00	6.961.078.243,00	14,78
	2 Dana Alokasi Umum	768.034.584.000,00	768.034.584.000,00	-	-
	3 Dana Alokasi Khusus	63.281.450.000,00	63.281.450.000,00	-	-
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	282.115.528.930,00	285.620.536.000,00	3.505.007.070,00	1,24
	1 Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	100,00
	2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	57.631.810.000,00	64.463.325.000,00	6.831.515.000,00	11,85
	3 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lain	13.764.027.930,00	15.437.520.000,00	1.673.492.070,00	12,15
	4 Dana Penyesuaian & otonomi khusus			-	-
	5 Tunjangan profesi guru	205.719.691.000,00	205.719.691.000,00	-	-
B	BELANJA	1.345.680.130.604,54	1.282.878.383.296,48	(62.801.747.308,06)	4,66
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	921.663.602.128,54	885.971.127.287,48	(35.692.474.841,06)	3,87
	1 Belanja Pegawai	842.912.215.299,00	818.671.801.730,00	(24.240.413.569,00)	2,87
	2 Belanja Bunga	120.145.200,00	37.873.282,48	(82.271.917,52)	68,47
	3 Belanja Subsidi	-	-	-	-
	4 Belanja Hibah	15.348.373.200,00	14.952.495.000,00	(395.878.200,00)	2,57
	5 Belanja Bantuan Sosial	10.525.137.912,00	6.895.326.112,00	(3.629.811.800,00)	34,48
	6 Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	1.949.182.600,00	1.949.182.600,00	-	-
	7 Belanja Bantuan keul kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	43.970.671.500,00	43.254.230.563,00	(716.440.937,00)	1,62
	8 Belanja Tidak Terduga	6.837.876.417,54	210.218.000,00	(6.627.658.417,54)	96,92
	BELANJA LANGSUNG	424.016.528.476,00	396.907.256.009,00	(27.109.272.467,00)	6,39
	1 Belanja Pegawai	80.792.157.457,00	75.488.327.565,00	(5.303.829.892,00)	6,56
	2 Belanja Barang dan Jasa	193.203.033.536,00	181.312.175.634,00	(11.890.857.902,00)	6,15
	3 Belanja Modal	150.021.337.483,00	140.106.752.810,00	(9.914.584.673,00)	6,60
	Surplus (Defisit)	(43.549.029.460,07)	54.692.342.086,08	98.241.371.546,15	225,58
C	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	62.216.920.839,07	62.686.562.399,89	469.641.560,82	0,75
	1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	59.653.676.489,07	59.581.049.143,07	(72.627.346,00)	0,12
	2 Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	-
	2 Penerimaan Piutang Daerah	2.563.244.350,00	3.105.513.256,82	542.268.906,82	21,15
	3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi	-	-	-	-
	4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan	-	-	-	-
	PENGELUARAN DAERAH	18.667.891.379,00	13.271.230.676,26	(5.396.660.702,74)	28,90
	1 Transfer Dana Cadangan	-	-	-	-
	2 Penyertaan Modal	18.552.660.379,00	13.156.000.000,00	(5.396.660.379,00)	29,08
	3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	115.231.000,00	115.230.676,26	(323,74)	-
	4 Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	43.549.029.460,07	49.415.331.723,63	5.866.302.263,56	13,47
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		104.107.673.809,71	104.107.673.809,71	

BUPATI BANTUL,

Ir. SRI SURYA WIDATI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2013 DAN 31 Desember 2012
Audited

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2013 (Rp)		Realisasi TA 2013 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2012 (Rp)
PENDAPATAN	511	1.503.865.465.664,67		1.520.302.695.802,31	101,09	1.337.570.725.382,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.	205.407.209.787,07	13,66%	224.197.864.331,31	109,15	186.597.778.028,56
Pajak Daerah	1.a)	64.487.000.000,00		83.232.017.500,20	129,07	51.768.352.231,50
Retribusi Daerah	1.b)	26.671.104.494,00		27.115.288.436,00	101,67	20.595.098.751,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.c)	9.508.075.667,00		9.508.075.666,16	100,00	8.194.263.102,01
Lain-lain PAD	1.d)	104.741.029.626,07		104.341.484.728,95	99,62	86.050.063.944,05
PENDAPATAN TRANSFER	2	1.258.229.035.877,60	83,67%	1.262.574.142.571,00	100,35	1.155.535.427.354,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P	2.a)	938.968.131.005,00		938.492.077.341,00	99,95	885.352.411.354,00
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a).1)	32.602.492.211,00		31.655.243.100,00		49.864.791.011,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	2.a).2)	4.358.124.794,00		4.829.320.241,00	110,81	4.171.586.343,00
Dana Alokasi Umum	2.a).3)	854.810.634.000,00		854.810.634.000,00	100,00	768.034.584.000,00
Dana Alokasi khusus	2.a).4)	47.196.880.000,00		47.196.880.000,00	100,00	63.281.450.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.b)	246.782.676.000,00		246.782.676.000,00	100,00	205.719.691.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusu	2.b).1)					0,00
Dana Tunjangan Pendidikan	2.b).2)	246.782.676.000,00		246.782.676.000,00	100,00	205.719.691.000,00
lainnya		0,00				
Transfer Pemerintah Propinsi	2.c)	72.478.228.872,60		77.299.389.230,00	106,65	64.463.325.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c).1)	72.478.228.872,60		77.299.389.230,00	106,65	64.463.325.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAI	3	40.229.220.000,00	0,77%	33.530.688.900,00	83,35	15.437.520.000,00
Pendapatan Hibah	3.a)	11.605.280.000,00		4.931.948.900,00	42,50	-
Pendapatan Dana Darurat	3.b)				-	
Pendapatan Lainnya	3.c)	28.623.940.000,00		28.598.740.000,00	99,91	15.437.520.000,00
					-	
BELANJA	512	1.570.168.261.924,38		1.387.719.170.740,07	88,38	1.282.878.383.296,48
BELANJA OPERASI	1	1.345.198.933.881,00	77,38%	1.204.273.540.264,98	89,53	1.140.612.229.886,48
Belanja Pegawai	1.a)	1.040.922.494.824,00		947.096.405.053,00	90,99	894.160.129.295,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	222.764.890.657,00		188.170.397.306,06	84,47	181.312.175.634,00
Belanja Bunga	1.c)	51.506.900,00		24.051.602,92	46,70	37.873.282,48
Belanja Subsidi	1.d)					
Belanja Hibah	1.e)	22.932.379.800,00		19.101.477.840,00	83,29	14.952.495.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	18.003.050.000,00		15.778.200.000,00	87,64	6.895.326.112,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	40.524.621.500,00		34.103.008.463,00	84,15	43.254.230.563,00
BELANJA MODAL	2	196.988.137.204,00	0,38%	183.269.840.475,09	93,04	140.106.752.810,00
Belanja Tanah	2.a)	4.892.652.400,00		3.571.227.380,00	72,99	1.723.046.790,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	35.784.526.319,00		28.204.936.652,00	78,82	30.384.563.920,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	41.415.647.503,00		40.669.661.505,91	98,20	36.129.061.430,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	106.977.976.407,00		103.788.960.292,18	97,02	63.581.718.620,00
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	7.917.334.575,00		7.035.054.645,00	88,86	8.288.362.050,00
Belanja Aset lainnya	2.f)			-		-

1

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2013 (Rp)		Realisasi TA 2013 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2012 (Rp)
BELANJA TAK TERDUGA	3	**25.912.008.239,38**	1,93%	**175.790.000,00**	0,68	**210.218.000,0**
Belanja Tak terduga		25.912.008.239,38		175.790.000,00	0,68	210.218.000,0
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA	4	**2.069.182.600,00**	0,09%	**0,00**	-	**1.949.182.600,0**
Bagi Hasil Pajak	4.a)	1.201.463.600,00	72,22%	0,00	-	1.201.463.600,0
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	867.719.000,00	#REF!	0,00	-	747.719.000,0
Surplus Defisit		(66.302.796.259,71)		132.583.525.062,24	(199,97)	54.692.342.086,08
Pembiayaan	513					
PENERIMAAN DAERAH	1	**113.940.333.809,71**		**110.873.724.177,71**	97,31	**62.686.562.399,8**
Penggunaan SILPA		104.107.673.809,71		104.107.673.809,71	100,00	59.581.049.143,0
Pencairan dana Cadangan						
Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman daerah						
Penerimaan pemberian Pinjaman						
Penerimaan kembali dana bergulir		9.832.660.000,00		6.766.050.368,00	68,81	3.105.513.256,8
PENGELUARAN DAERAH	2	**47.637.537.550,00**		**39.062.286.226,26**	82,00	**13.271.230.676,2**
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan (Investasi) Pemda	2.a)	37.074.500.000,00		31.074.500.000,00	83,82	13.156.000.000,0
Pembayaran Pokok Hutang	2.b)	181.037.550,00		181.036.226,26	100,00	115.230.676,2
Pemberian Pinjaman	2.c)	10.382.000.000,00		7.806.750.000,00		
Pembiayaan Netto		66.302.796.259,71		71.811.437.951,45	108,31	49.415.331.723,63
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00		204.394.963.013,69		104.107.673.[illegible]71

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

2

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
audited

URAIAN	JUMLAH TA 2014		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	9	10	9	10
PENDAPATAN	1.733.247.144.497,78	1.813.817.142.996,75	80.669.998.197,97	104,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	298.038.728.992,34	387.411.062.723,21	89.372.333.730,87	124,08
1 Pajak Daerah	77.892.200.000,00	99.058.470.705,00	21.966.270.705,00	127,82
2 Retribusi Daerah	28.470.454.741,00	28.004.713.221,00	(465.741.520,00)	98,24
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.638.557.151,34	12.643.382.252,68	4.825.101,34	100,04
4 Lain-Lain PAD	171.037.817.100,00	219.204.496.544,53	48.166.979.444,53	128,16
DANA PERIMBANGAN	1.042.578.600.994,00	1.036.632.898.871,00	(5.945.702.123,00)	99,43
1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	32.412.042.994,00	26.466.340.871,00	(5.945.702.123,00)	81,66
2 Dana Alokasi Umum	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00	-	100,00
3 Dana Alokasi Khusus	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00	-	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	392.629.814.511,44	419.873.181.101,54	17.243.366.590,10	104,28
1 Pendapatan Hibah	1.877.560.000,00	3.413.205.900,00	1.535.625.900,00	181,79
2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	83.287.001.711,44	98.768.112.401,54	15.481.110.690,10	118,59
3 Dana Penyesuaian & otonomi khusus	285.847.270.000,00	285.847.270.000,00	-	100,00
4 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lain	31.617.962.800	31.844.592.800,00	226.630.000,00	100,72
BELANJA	1.901.355.826.511,47	1.700.351.278.809,56	(201.004.547.701,91)	89,43
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.103.697.182.625,47	978.483.338.793,56	(125.213.843.831,91)	88,66
1 Belanja Pegawai	1.008.895.356.969,00	908.310.595.284,00	(100.584.761.685,00)	90,02
2 Belanja Bunga	10.500.000,00	10.326.591,56	(173.408,44)	98,35
3 Belanja Subsidi	-	-	-	
4 Belanja Hibah	8.952.744.000,00	7.870.765.000,00	(1.081.979.000,00)	87,91
5 Belanja Bantuan Sosial	12.969.925.000,00	11.729.150.000,00	(1.240.775.000,00)	90,43
6 Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	-	-	-	
7 Belanja Bantuan keul kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	59.939.587.100,00	50.215.239.431,00	(9.724.347.669,00)	83,78
8 Belanja Tidak Terduga	12.929.069.556,47	347.262.487,00	(12.581.807.069,47)	2,69
BELANJA LANGSUNG	797.658.643.886,00	721.867.940.016,00	(75.790.703.870,00)	90,50
1 Belanja Pegawai	119.076.607.317,00	107.521.636.429,00	(11.554.970.888,00)	90,30
2 Belanja Barang dan Jasa	348.815.942.641,00	303.931.012.821,00	(44.884.929.820,00)	87,13
1) Bel hibah brijs diserahkan ke mass	24.716.763.500,00	18.882.597.365,00		76,40
2) Bel Sant sosial brgljs diserahkan ke mass	-	0		
3) Bel Barang dan jasa	374.099.159.141,00	285.048.415.456,00		87,95
3 Belanja Modal	329.766.093.928,00	310.415.290.766,00	(19.350.803.162,00)	94,13
Surplus (Defisit)	(168.108.682.013,69)	113.565.863.886,19	281.674.545.899,88	(67,56)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN DAERAH	211.628.963.013,69	213.163.271.394,69	1.534.308.381,00	100,72
1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	204.394.962.013,69	204.394.963.013,69	-	100,00
2 Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	
2 Penerimaan Piutang Daerah	7.234.000.000,00	8.768.308.381,00	1.534.308.381,00	121,21
3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi	-	-	-	
4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan	-	-	-	
PENGELUARAN DAERAH	43.520.281.000,00	43.309.252.682,12	(211.028.317,88)	99,52
1 Transfer Dana Cadangan	-	-	-	
2 Penyertaan Modal	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	100,00
3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	115.281.000,00	115.252.682,12	(28.317,88)	99,93
4 Pemberian Pinjaman Daerah	8.405.000.000,00	8.194.000.000,00	(211.000.000,00)	97,49
SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	168.108.682.013,69	169.854.018.712,57	1.745.336.698,88	101,04
Silisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Be	-	283.419.882.598,76	283.419.882.598,76	

Bantul, Mei 2015
BUPATI BANTUL

SRI SURYA WIDATI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 Desember 2014 DAN 31 Desember 2013
Audited

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2014 (Rp)	Realisasi TA 2014 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2013 (Rp)
PENDAPATAN	**511**	**1.733.247.144.497,78**	**1.813.917.142.695,75**	**104,65**	**1.520.302.695.802,31**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**1.**	**288.038.728.992,34**	**357.411.062.723,21**	**124,08**	**224.197.864.331,31**
Pajak Daerah	1.a)	77.892.200.000,00	99.558.470.705,00	127,82	83.232.017.500,20
Retribusi Daerah	1.b)	26.470.454.741,00	26.004.713.221,00	98,24	27.116.286.436,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.c)	12.638.557.151,34	12.643.382.252,68	100,04	9.508.075.666,16
Lain-lain PAD	1.d)	171.037.517.100,00	219.204.496.544,53	128,16	104.341.484.728,95
PENDAPATAN TRANSFER	**2**	**1.411.712.872.705,44**	**1.421.248.281.272,54**	**100,68**	**1.262.574.142.571,00**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana P	**2.a)**	**1.042.578.600.994,00**	**1.036.632.898.871,00**	**99,43**	**938.492.077.341,00**
Dana Bagi Hasil Pajak	2.a).1)	27.742.098.187,00	21.545.802.316,00	-	31.655.243.100,00
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	2.a).2)	4.669.944.807,00	4.920.538.555,00	105,37	4.829.320.241,00
Dana Alokasi Umum	2.a).3)	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00	100,00	854.810.634.000,00
Dana Alokasi khusus	2.a).4)	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00	100,00	47.196.880.000,00
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	**2.b)**	**285.847.270.000,00**	**285.847.270.000,00**	**100,00**	**246.782.676.000,00**
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID)	2.b).1)	24.700.344.000,00	24.700.344.000,00		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Dana Tunjangan Pendidikan)	2.b).2)	261.146.926.000,00	261.146.926.000,00	100,00	246.782.676.000,00
Transfer Pemerintah Propinsi	**2.c)**	**83.287.001.711,44**	**98.768.112.401,54**	**118,59**	**77.299.389.230,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.c).1)	83.287.001.711,44	98.768.112.401,54	118,59	77.299.389.230,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAI	**3**	**33.495.542.800,00**	**35.257.798.700,00**	**105,26**	**33.530.688.900,00**
Pendapatan Hibah	3.a)	1.877.580.000,00	3.413.205.900,00		4.931.948.900,00
Pendapatan Dana Darurat	3.b)			-	
Pendapatan Lainnya	3.c)	31.617.962.800,00	31.844.592.800,00	100,72	28.598.740.000,00
				-	
BELANJA	**512**	**1.901.355.826.511,47**	**1.700.351.278.809,56**	**89,43**	**1.387.719.170.740,07**
BELANJA OPERASI	**1**	**1.558.660.663.027,00**	**1.389.588.725.556,56**	**89,15**	**1.204.273.540.264,98**
Belanja Pegawai	1.a)	1.127.971.964.286,00	1.015.832.231.713,00	90,06	947.096.405.053,00
Belanja Barang dan Jasa	1.b)	324.099.159.141,00	285.048.415.456,00	87,95	188.170.397.306,06
Belanja Bunga	1.c)	10.500.000,00	10.326.591,56	98,35	24.051.602,92
Belanja Subsidi	1.d)				
Belanja Hibah	1.e)	33.669.527.500,00	26.753.362.365,00	79,46	19.101.477.840,00
Belanja Bantuan Sosial	1.f)	12.969.925.000,00	11.729.150.000,00	90,43	15.778.200.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	1.g)	59.939.587.100,00	50.215.239.431,00	83,78	34.103.008.463,00
BELANJA MODAL	**2**	**329.766.093.928,00**	**310.415.290.766,00**	**94,13**	**183.269.840.475,09**
Belanja Tanah	2.a)	14.371.165.000,00	12.168.578.960,00	84,67	3.571.227.380,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.b)	58.025.932.122,00	48.512.448.177,00	83,60	28.204.936.652,00
Belanja Gedung dan Bangunan	2.c)	93.751.852.513,00	91.930.052.870,00	98,06	40.669.661.505,91
Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	2.d)	153.689.402.401,00	152.280.170.185,00	99,08	103.788.960.292,18
Belanja Aset tetap lainnya	2.e)	9.927.741.892,00	5.524.040.574,00	55,64	7.035.054.645,00
Belanja Aset lainnya	2.f)		-		-
BELANJA TAK TERDUGA	**3**	**12.929.069.556,47**	**347.262.487,00**	**2,69**	**175.790.000,00**
Belanja Tak terduga		12.929.069.556,47	347.262.487,00	2,69	175.790.000,00
TRANSFER KE KAB/KOTA/DESA	**4**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

2

URAIAN	CaLK	Anggaran TA 2014 (Rp)	Realisasi TA 2014 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2013 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	4.a)	0,00	0,00		0,00
Bagi Hasil Retribusi	4.b)	0,00	0,00		0,00
Surplus Defisit		(168.108.682.013,69)	113.565.663.886,19	(67,55)	132.583.525.062,24
Pembiayaan	513				
PENERIMAAN DAERAH	1	**211.628.963.013,69**	**213.163.271.394,69**	100,73	**110.873.724.177,71**
Penggunaan SILPA		204.394.963.013,69	204.394.963.013,69	100,00	104.107.673.809,71
Pencairan dana Cadangan					
Penjualan Kekayaan daerah yang dispisahkan					
Penerimaan Pinjaman daerah					
Penerimaan pemberian Pinjaman					
Penerimaan kembali dana bergulir		7.234.000.000,00	8.768.308.381,00	121,21	6.766.050.368,00
PENGELUARAN DAERAH	2	**43.520.281.000,00**	**43.309.252.682,12**	99,52	**39.062.286.226,26**
Pembentukan Dana Cadangan					
Penyertaan (Investasi) Pemda	2.a)	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00	31.074.500.000,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.b)	115.281.000,00	115.252.682,12	99,98	181.036.226,26
Pemberian Pinjaman	2.c)	8.405.000.000,00	8.194.000.000,00		7.806.750.000,00
Pembiayaan Netto		**168.108.682.013,69**	**169.854.018.712,57**	101,04	**71.811.437.951,45**
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN		**0,00**	**283.419.882.598,76**		**204.394.963.013,69**

Bantul, Mei 2015

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR 06
TANGGAL 03 AGUSTUS 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 dan TA 2014
Audited

ode	Uraian	Anggaran TA 2015 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2014 (Rp)
	PENDAPATAN- LRA				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	335,797,050,980.39	390,624,492,073.16	116.33	357,411,062,723.21
1	Pajak Daerah	93,709,829,500.00	123,257,183,734.63	131.53	99,558,470,705.00
2	Retribusi Daerah	19,765,236,806.00	22,840,342,141.00	115.56	26,004,713,221.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	18,373,310,924.39	18,379,740,300.31	100.03	12,643,382,252.68
4	Lain-lain PAD	203,948,673,750.00	226,147,225,897.22	110.88	219,204,496,544.53
	PENDAPATAN TRANSFER	1,572,102,392,106.28	1,555,424,156,231.89	98.94	1,453,092,874,072.54
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,054,209,874,000.00	1,041,842,481,074.00	98.83	1,036,632,898,871.00
1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	30,170,278,000.00	20,825,979,100.00	69.03	21,545,802,316.00
1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	6,015,799,000.00	5,805,994,974.00	96.51	4,920,538,555.00
1.03	Dana Alokasi Umum	942,850,827,000.00	942,850,827,000.00	100.00	949,252,188,000.00
1.04	Dana Alokasi khusus	75,172,970,000.00	72,359,660,000.00	96.26	60,914,370,000.00
2	Lainnya	314,195,046,000.00	354,195,046,000.00	100.00	285,847,270,000.00
2.01	Dana Otonomi Khusus	354,195,046,000.00	354,195,046,000.00	100.00	285,847,270,000.00
2.02	Dana Penyesuaian				
3	Lainnya	130,830,372,106.28	127,655,949,157.89	97.57	98,768,112,401.54
3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	130,830,372,106.28	127,655,949,157.89	97.57	98,768,112,401.54
3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
4	Bantuan Keuangan- LRA	32,867,100,000.00	31,730,700,000.00	96.54	31,844,592,800.00
4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	32,867,100,000.00	31,730,700,000.00	96.54	31,844,592,800.00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6,160,000,000.00	5,174,588,400.00	84.00	3,413,205,900.00
1	Pendapatan Hibah	6,160,000,000.00	5,174,588,400.00	84.00	3,413,205,900.00
1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA	6,160,000,000.00	5,174,588,400.00	84.00	3,413,205,900.00
1.02	Pendapatan Hibah dari PemerintahDaerah Lainnya-LRA				
1.03	Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri- LRA				
1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan-LRA				
2	Pendapatan Dana Darurat				
3	Pendapatan Lainnya				
	JUMLAH PENDAPATAN	1,914,059,443,086.67	1,951,223,236,705.05	101.94	1,813,917,142,695.75
	BELANJA	2,029,782,511,423.43	1,784,169,348,315.00	87.90	1,650,136,039,378.56
	Belanja Operasi	1,661,664,889,424.75	1,448,672,882,416.00	87.18	1,339,373,486,125.56
1	Belanja Pegawai	1,166,213,313,020.00	1,016,655,176,910.00	87.18	1,015,832,231,713.00
2	Belanja Barang dan Jasa	416,776,979,404.75	371,130,713,662.00	89.05	303,931,012,821.00
3	Belanja Bunga	-	-		10,326,591.56
4	Belanja Subsidi				
5	Belanja Hibah	60,282,647,000.00	43,433,691,844.00	72.05	7,870,765,000.00
6	Belanja Bantuan Sosial	18,391,950,000.00	17,453,300,000.00	94.90	11,729,150,000.00
	Belanja Modal	350,585,867,975.25	334,880,395,261.00	95.52	310,415,290,766.00
1	Belanja Tanah	8,017,154,000.00	7,846,987,959.00	97.88	12,168,578,960.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	81,430,503,407.25	70,693,345,372.00	87.06	48,512,448,177.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	82,229,712,967.00	78,770,205,329.00	95.79	91,930,052,870.00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	176,492,161,551.00	175,080,698,451.00	99.20	152,280,170,185.00
5	Belanja Aset tetap lainnya	2,416,336,050.00	2,289,158,150.00	94.74	5,524,040,574.00
	Belanja Tak Terduga	17,531,754,023.43	616,070,638.00	3.51	347,262,487.00
1	Belanja Tak terduga	17,531,754,023.43	616,070,638.00	3.51	347,262,487.00

odv	Uraian	Anggaran TA 2015 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	(%)	Realisasi TA 2014 (Rp)
	TRANSFER	149,474,825,652.00	149,133,147,142.00	99.77	50,215,239,431.00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11,177,432,740.00	11,177,422,633.00	100.00	0.00
.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daersh	8,500,010,000.00	8,500,000,000.00	100.00	0.00
.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	2,677,422,740.00	2,677,422,633.00	100.00	0.00
	Transfer Bantuan Keuangan	138,297,392,912.00	137,955,724,509.00	99.75	50,215,239,431.00
.1	Daerah Lainnya	662,879,000.00	488,879,000.00	73.75	90,000,000.00
.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	136,578,410,000.00	136,565,458,500.00	99.99	49,747,764,098.00
.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,056,103,912.00	901,387,009.00	85.35	377,475,333.00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2,179,257,337,075.43	1,933,302,495,457.00	88.71	1,700,351,278,809.56
	Surplus Defisit	(265,197,893,988.76)	17,920,741,248.05	(6.76)	113,565,863,886.19
	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan daerah	301,208,893,988.76	298,601,809,909.76	99.13	213,163,271,394.69
.1	Penggunaan SILPA	283,419,882,598.76	283,419,882,598.76	100.00	204,394,963,013.69
.2	Pencairan dana Cadangan				0.00
.3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	7,378,011,390.00	7,378,001,390.00	100.00	0.00
.4	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri				0.00
.5	Penerimaan Kembali Piutang				8,768,308,381.00
.6	Lainnya	10,411,000,000.00	7,803,925,921.00	74.96	
	Pengeluaran Daerah	36,011,000,000.00	33,496,500,000.00	93.02	43,309,252,682.12
.1	Pembentukan Dana Cadangan				0.00
.2	Penyertaan (Investasi) Pemda	25,600,000,000.00	25,600,000,000.00	100.00	35,000,000,000.00
.3	Pembayaran Pokok Hutang				115,252,682.12
.4	Pemberian Pinjaman				
5	Pengeluaran Investasi non Permanen Lainnya	10,411,000,000.00	7,896,500,000.00	75.85	8,194,000,000.00
	Pembiayaan Netto	265,197,893,988.76	265,105,309,909.76	99.97	169,854,018,712.57
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	-	283,026,051,157.81		283,419,882,598.76

Bantul, 2016
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
audited

	URAIAN	JUMLAH TA 2015		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2	9	10	9	10
A	PENDAPATAN	1.914.059.443.086,67	1.951.223.236.705,05	37.163.793.618,38	101,94
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	336.797.050.980,39	390.624.492.073,16	54.827.441.092,77	116,33
	1 Pajak Daerah	93.709.829.500,00	123.257.183.734,63	29.547.354.234,63	131,53
	2 Retribusi Daerah	19.765.236.806,00	22.840.342.141,00	3.075.105.335,00	115,56
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.373.310.924,39	18.379.740.300,31	6.429.375,92	100,03
	4 Lain-Lain PAD	203.948.673.750,00	226.147.225.897,22	22.198.552.147,22	110,88
	DANA PERIMBANGAN	1.054.209.874.000,00	1.041.842.461.074,00	(12.367.412.926,00)	98,83
	1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	36.186.077.000,00	26.631.974.074,00	(9.554.102.926,00)	73,60
	2 Dana Alokasi Umum	942.850.827.000,00	942.850.827.000,00	-	100,00
	3 Dana Alokasi Khusus	75.172.970.000,00	72.359.660.000,00	(2.813.310.000,00)	96,26
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	524.052.518.106,28	518.756.283.557,89	(5.296.234.548,39)	98,99
	1 Pendapatan Hibah	6.160.000.000,00	6.174.588.400,00	(985.411.600,00)	84,00
	2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	130.830.372.106,28	127.655.949.157,89	(3.174.422.948,39)	97,57
	3 Dana Penyesuaian & otonomi khusus	354.195.046.000,00	354.195.046.000,00	-	100,00
	4 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya	32.867.100.000	31.730.700.000,00	(1.136.400.000,00)	96,54
B	BELANJA	2.179.267.337.075,43	1.933.302.495.457,00	(245.964.841.618,43)	88,71
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.359.234.039.732,43	1.178.889.689.579,00	(180.344.350.153,43)	86,73
	1 Belanja Pegawai	1.113.552.863.057,00	968.253.479.955,00	(145.299.383.102,00)	86,95
	2 Belanja Bunga	-		-	
	3 Belanja Subsidi	-		-	
	4 Belanja Hibah	60.282.647.000,00	43.433.691.844,00	(16.848.955.156,00)	72,05
	5 Belanja Bantuan Sosial	18.391.950.000,00	17.453.300.000,00	(938.650.000,00)	94,90
	6 Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	11.177.432.740,00	11.177.422.633,00	(10.107,00)	100,00
	7 Belanja Bantuan keul kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	138.297.392.912,00	137.955.724.509,00	(341.668.403,00)	99,75
	8 Belanja Tidak Terduga	17.531.754.023,43	616.070.638,00	(16.915.683.385,43)	3,51
	BELANJA LANGSUNG	820.023.297.343,00	754.412.805.878,00	(65.610.491.465,00)	92,00
	1 Belanja Pegawai	52.660.449.063,00	48.401.696.955,00	(4.258.753.008,00)	91,91
	2 Belanja Barang dan Jasa	416.776.979.404,75	371.130.713.662,00	(45.646.265.742,75)	89,05
	1) Bel hibah brljs diserahkan ke mass	-	-	-	
	2) Bel Bant sosial brg/js diserahkan ke mas	-	0	-	
	3) Bel Barang dan jasa	416.776.979.404,75	371.130.713.662,00	(45.646.265.742,75)	89,05
	3 Belanja Modal	350.585.867.975,25	334.880.395.261,00	(15.705.472.714,25)	95,52
	Surplus (Defisit)	(265.197.893.988,76)	17.920.741.248,05	283.118.635.236,81	(6,76)
C	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	301.208.893.988,76	298.601.809.909,76	(2.607.084.079,00)	99,13
	1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.419.882.598,76	283.419.882.598,76	-	100,00
	2 Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	
	2 Penerimaan Piutang Daerah	10.411.000.000,00	7.803.925.921,00	(2.607.074.079,00)	74,96
	3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi	-	-	-	
	4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan	7.378.011.390,00	7.378.001.390,00	(10.000,00)	
	PENGELUARAN DAERAH	36.011.000.000,00	33.496.500.000,00	(2.514.500.000,00)	93,02
	1 Transfer Dana Cadangan	-	-	-	
	2 Penyertaan Modal	25.600.000.000,00	25.600.000.000,00	-	100,00
	3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	10.411.000.000,00	7.896.500.000,00	(2.514.500.000,00)	75,85
	4 Pemberian Pinjaman Daerah				
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	265.197.893.988,76	265.105.309.909,76	(92.584.079,00)	99,97
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun B	0,00	283.026.051.157,81	283.026.051.157,81	

Bantul, 1 Maret 2016
BUPATI BANTUL

DRS. H SUHARSONO

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR 07 Tahun 2017
TANGGAL 11 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
Audited

	URAIAN	JUMLAH TA 2016		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	2	9	10	9	10
A	PENDAPATAN	2.092.586.355.760,60	2.000.334.166.353,84	(92.252.189.406,76)	95,59
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	373.241.806.617,00	404.454.703.746,07	31.212.897.129,07	108,36
	1 Pajak Daerah	114.668.270.000,00	133.474.742.165,22	18.806.472.165,22	116,40
	2 Retribusi Daerah	23.098.968.815,67	26.613.085.433,67	3.514.116.618,00	115,21
	3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.068.269.986,22	21.068.269.986,18	(0,04)	100,00
	4 Lain-Lain PAD	214.406.297.815,11	223.298.606.161,00	8.892.308.345,89	104,15
	DANA PERIMBANGAN	1.466.779.753.000,00	1.331.352.777.163,00	(135.426.975.837,00)	90,77
	1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	39.277.436.000,00	39.338.415.888,00	60.979.888,00	100,16
	2 Dana Alokasi Umum	999.814.365.000,00	999.814.365.000,00	-	100,00
	3 Dana Alokasi Khusus Fisik	107.790.599.000,00	99.372.454.939,00	(8.418.144.061,00)	92,19
	4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik	319.897.353.000,00	192.827.541.336,00	(127.069.811.664,00)	60,28
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	252.564.796.143,60	264.526.685.444,77	11.961.889.301,17	104,74
	1 Pendapatan Hibah	6.250.000.000,00	6.148.735.500,00	(101.264.500,00)	98,38
	2 Bagi Hasil Pajak dr Prop dan Pemda lainya	122.724.051.143,60	137.137.204.944,77	14.413.153.801,17	111,74
	3 Dana Penyesuaian & otonomi khusus	99.912.945.000,00	99.912.945.000,00	-	100,00
	4 Bantuan Keuangan dr Prop atau Pemda lainnya	23.677.800.000	21.327.800.000,00	(2.350.000.000,00)	90,08
B	BELANJA	2.358.567.406.918,41	2.016.543.978.974,11	(342.023.427.944,30)	85,50
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.497.364.759.107,51	1.265.890.290.230,00	(231.474.468.877,51)	84,54
	1 Belanja Pegawai	1.225.249.824.782,00	1.032.505.302.997,00	(192.744.521.785,00)	84,27
	2 Belanja Bunga	-		-	
	3 Belanja Subsidi	-		-	
	4 Belanja Hibah	34.738.229.500,00	31.862.069.500,00	(2.876.160.000,00)	91,72
	5 Belanja Bantuan Sosial	5.578.550.000,00	3.267.350.000,00	(2.311.200.000,00)	58,57
	6 Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	12.664.759.430,00	12.429.995.580,00	(234.763.850,00)	98,15
	7 Belanja Bantuan keul kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	195.396.577.000,00	185.304.599.853,00	(10.091.877.147,00)	94,84
	8 Belanja Tidak Terduga	23.736.818.395,51	520.872.300,00	(23.215.946.095,51)	2,19
	BELANJA LANGSUNG	861.202.647.810,90	750.653.688.744,11	(110.548.959.066,79)	87,16
	1 Belanja Pegawai	50.819.149.200,00	44.678.753.435,00	(6.140.395.765,00)	87,92
	2 Belanja Barang dan Jasa	481.755.149.995,90	421.914.402.647,16	(59.840.747.348,74)	87,58
	1) Bel hibah brjs diserahkan ke mass	-	-	-	
	2) Bel Bant sosial brg/js diserahkan ke mass	-	0	-	
	3) Bel Barang dan jasa	481.755.149.995,90	421.066.369.647,16	(60.688.780.348,74)	87,40
	3 Belanja Modal	328.628.348.615,00	284.060.532.661,95	(44.567.815.953,05)	86,44
	Surplus (Defisit)	(265.981.051.157,81)	(16.209.812.620,27)	249.771.238.537,54	6,09
C	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH	292.736.051.157,81	293.078.441.725,81	342.390.568,00	100,12
	1 Sisa Lebih Perhitungan Th lalu	283.026.051.157,81	283.026.051.157,81	-	100,00
	2 Transfer ke Dana Cadangan	-	-	-	
	2 Penerimaan Piutang Daerah	9.710.000.000,00	8.710.516.768,00	(999.483.232,00)	89,71
	3 Penerimaan Pinjaman & Obligasi	-	-	-	
	4 Penjualan aset daerah yg dipisahkan	-	1.341.873.800,00	1.341.873.800,00	
	PENGELUARAN DAERAH	26.755.000.000,00	24.752.000.000,00	(2.003.000.000,00)	92,51
	1 Transfer Dana Cadangan	-	-	-	
	2 Penyertaan Modal	16.045.000.000,00	16.045.000.000,00	-	100,00
	3 Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	10.710.000.000,00	8.707.000.000,00	(2.003.000.000,00)	81,30
	4 Pemberian Pinjaman Daerah	265.981.051.157,81	268.326.441.725,81	2.345.390.568,00	100,88
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	-	252.116.629.105,54	252.116.629.105,54	
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Bd				

Bantul, 2017
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR 07 Tahun 2017
TANGGAL 11 Agustus 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 dan TA 2015
Audited

Kode	Uraian	REF	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN- LRA					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a	373.241.806.617,00	404.454.703.746,07	390.624.492.073,16	108,36
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	114.668.270.000,00	133.474.742.165,22	123.257.183.734,63	116,40
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	23.098.968.815,67	26.613.085.433,67	22.840.342.141,00	115,21
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.1.1.a.3)	21.068.269.986,22	21.068.269.986,18	18.379.740.380,51	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD	5.1.1.a.4)	214.406.297.815,11	223.298.606.161,00	226.147.225.897,22	104,15
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b	1.713.094.549.143,60	1.589.730.727.107,77	1.555.424.156.131,89	92,80
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)	1.466.779.753.000,00	1.331.382.777.163,00	1.041.842.461.074,00	90,77
4.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)	34.066.692.000,00	34.632.858.847,00	20.825.979.100,00	101,66
4.2.1.02	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)	5.210.744.000,00	4.705.557.041,00	5.805.994.974,00	90,30
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1)	999.814.365.000,00	999.814.365.000,00	942.850.827.000,00	100,00
4.2.1.04	Dana Alokasi khusus	5.1.1.b.1)	107.790.599.000,00	99.372.454.939,00	72.359.660.000,00	92,19
4.2.1.05	Dana Alokasi khusus (non fisik)	5.1.1.b.1)	319.897.353.000,00	192.827.541.336,00		60,28
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	5.1.1.b.2)	99.912.945.000,00	99.912.945.000,00	354.195.046.000,00	100,00
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus					
4.2.2.02	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2)	99.912.945.000,00	99.912.945.000,00	354.195.046.000,00	100,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)	122.724.051.143,60	137.137.204.944,77	127.655.949.157,89	111,74
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)	122.724.051.143,60	137.137.204.944,77	127.655.949.157,89	111,74
4.2.3.02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.1.b.3)				
4.2.4	Bantuan Keuangan- LRA	5.1.1.b.4)	23.677.800.000,00	21.327.800.000,00	31.730.700.000,00	90,08
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.b.4)	23.677.800.000,00	21.327.800.000,00	31.730.700.000,00	90,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c	6.250.000.000,00	6.148.735.500,00	5.174.588.400,00	98,38
4.3.1	Pendapatan Hibah		6.250.000.000,00	6.148.735.500,00	5.174.588.400,00	98,38
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LRA	5.1.1.c.1)	6.250.000.000,00	6.148.735.500,00	5.174.588.400,00	98,38
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari PemerintahDaerah Lainnya-LRA					
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri-LRA					
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan LRA					
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat					
4.3.3	Pendapatan Lainnya					
	JUMLAH PENDAPATAN		2.092.586.355.760,60	2.000.334.166.353,84	1.951.223.236.705,05	95,59
5	BELANJA	5.1.2	2.150.506.070.488,41	1.818.809.283.541,11	1.784.169.348.315,00	84,58
5.1	Belanja Operasi	5.1.2.a	1.798.140.903.477,90	1.534.227.878.579,16	1.448.672.882.416,00	85,32
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	1.276.068.973.982,00	1.077.184.056.432,00	1.016.655.176.910,00	84,41
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	481.755.149.995,90	421.066.369.647,16	371.130.713.662,00	87,40
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.a.3)				
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.a.4)				
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.a.5)	34.738.229.500,00	32.710.102.500,00	43.433.691.844,00	94,16
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.6)	5.578.550.000,00	3.267.350.000,00	17.453.300.000,00	58,57
5.2	Belanja Modal	5.1.2.b	328.628.348.615,00	284.060.532.661,95	334.880.395.261,00	86,44
5.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.b.1)	12.755.360.200,00	11.654.412.824,00	7.846.987.959,00	91,37
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	74.559.935.365,00	61.664.752.510,95	70.893.345.372,00	82,70
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	88.609.536.850,00	71.594.199.804,00	78.770.205.329,00	80,80
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	5.1.2.b.4)	149.563.496.200,00	136.453.446.503,00	175.080.698.451,00	91,23
5.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	5.1.2.b.5)	2.617.725.000,00	2.270.581.020,00	2.289.158.150,00	86,74
5.2.6	Belanja Aset lainnya	5.1.2.b.6)	522.295.000,00	423.140.000,00		81,02
5.3	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	23.736.818.395,51	520.872.300,00	616.070.638,00	2,19
5.3.1	Belanja Tak terduga	5.1.2.c	23.736.818.395,51	520.872.300,00	616.070.638,00	2,19

Kode	Uraian	REF	Anggaran TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2016 (Rp)	Realisasi TA 2015 (Rp)	(%)
6	TRANSFER	5.1.3	208.061.336.330,00	197.734.698.433,00	149.133.141.143,00	95,04
6.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.a	12.861.788.436,00	12.159.996.800,00	11.177.122.643,00	94,55
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.a.1)	9.868.837.000,00	9.817.381.190,00	8.500.000.000,00	99,48
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.3.a.2)	2.992.951.436,00	2.813.615.480,00	2.677.122.643,00	94,01
6.2	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.b	195.196.547.000,00	185.564.699.883,00	137.955.714.500,00	95,07
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemrintah Daerah Lainnya	5.1.3.b.1)	38.144.813.000,00	37.388.794.930,00	388.877.000,00	98,02
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	5.1.3.b.2)	183.974.263.000,00	156.733.038.500,00	136.565.458.500,00	85,19
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.b.3)	1.377.890.000,00	982.864.453,00	901.387.000,00	71,34
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.358.867.408.918,41	2.016.843.978.974,11	1.933.302.495.487,00	85,50
	Surplus Defisit		(165.981.051.157,81)	(16.309.813.630,37)	17.910.741.348,00	6,99
7	PEMBIAYAAN	5.1.4				
7.1	Penerimaan daerah	5.1.4.a	282.736.051.157,81	293.078.441.725,81	298.601.809.309,76	100,12
7.1.1	Penggunaan SILPA	5.1.4.a.1)	283.036.051.157,81	283.036.051.157,81	283.419.882.598,76	100,00
7.1.2	Pencairan dana Cadangan	5.1.4.a.3)				
7.1.3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	5.1.4.a.3)		1.341.873.800,00	7.378.091.390,00	
7.1.4	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	5.1.4.a.4)				
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	5.1.4.a.5)				
7.1.6	Penerimaan kembali Investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.a.6)	9.710.000.000,00	8.710.516.768,00	7.803.935.931,00	89,71
7.2	Pengeluaran Daerah	5.1.4.b	26.755.000.000,00	24.752.000.000,00	33.496.500.000,00	92,51
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.b.1)				
7.2.2	Penyertaan (Investasi) Pemda	5.1.4.b.2)	16.045.000.000,00	16.045.000.000,00	25.600.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	5.1.4.b.3)				
7.2.4	Pemberian Pinjaman	5.1.4.b.4)				
7.2.5	Pengeluaran investasi non Permanen Lainnya	5.1.4.b.5)	10.710.000.000,00	8.707.000.000,00	7.896.500.000,00	81,30
	Pembiayaan Netto		265.981.051.157,81	268.326.441.725,81	265.105.309.309,76	100,88
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN			252.116.629.105,84	283.036.051.157,81	

Bantul, 2017

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO